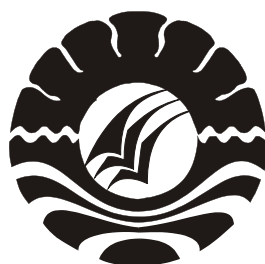


**PARTISIPASI PETANI TANPAK DALAM MELESTARIKAN
HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN PANGKEP**

***THE PARTICIPATION OF FISH FARMERS IN CONSERVING
MANGROVE FOREST PANGKEP REGENCY***

M. JASMIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2014

**PARTISIPASI PETANI TAMBAK DALAM MELESTARIKAN
HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN PANGKEP**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Derajat

Magister

Program Studi

Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Disusun dan Diajukan oleh

M. JASMIN

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2014

PRAKATA

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis dengan judul “Partisipasi Petani Tambak dalam Melestarikan Hutan Mangrove di Kabupaten Pangkep” dapat terselesaikan dengan baik.

Proses penyelesaian tesis ini, merupakan suatu perjuangan yang panjang bagi penulis. Selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun berkat keseriusan pembimbing dalam memberikan sumbangan pemikiran, saran, dan masukan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, Penulis patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. H. Guntut Yusuf, M.Si dan Dr. Ir. Muhammad Wiharto, M.Si selaku pembimbing. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim penguji, yaitu Dr. A. Mu'nisa, M.Si dan Prof. Dr. H. Gufran D Dirawan, M.EMD yang banyak memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih tak lupa pula disampaikan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Asisten Direktur I, Asisten Direktur II, dan Ketua Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, baik pada saat mengikuti perkuliahan, maupun pada saat pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan. Mudah-mudahan bantuan dan bimbingan yang diberikan mendapat pahala dari Allah swt.

Terima kasih, penulis ucapkan kepada Fachruddin, Anzar, Herlina, St Maryam, Fatmawati, Ibu Fia, Pardi dan rekan-rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan moril dalam perkuliahan, dan penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh masyarakat Pangkep khususnya petani tambak yang telah ambil bagian dalam penulisan tesis ini.

Terwujudnya tesis ini juga atas doa, dorongan, dan restu keluarga. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada ayahanda H. Musa, S.Pdi., Ibunda Hj. Haniang, S.Pd., istri tercinta Hikmawati SS., dan anak tersayang Azizah Naurah Nadhifa Jasmin, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pendidikan sampai selesainya penulisan tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Makassar,

Juli 2014

M. Jasmin

PERNYATAAN KEORISINILAN TESIS

Saya, M. Jasmin,

Nomor Pokok 10B03013,

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Partisipasi Petani Tambak dalam Melestarikan Hutan Mangrove di Kabupaten Pangkep”, merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam tesis ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, tidak ada bagian dari tesis ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh PPs Universitas Negeri Makassar.

18 Juli 2014

ABSTRAK

M. JASMIN 2014. Partisipasi Petani Tambak dalam Melestarikan Hutan Mangrove di Kabupaten Pangkep (Survei pada petani tambak di Kabupaten Pangkep).

Penelitian ini adalah penelitian survei yang bertujuan untuk mengetahui partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep. Populasi berjumlah 785 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *proporsional random sampling* dengan jumlah sampel 117 orang. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan pedoman wawancara dan pedoman kuesioner. Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: (1) tingkat pendidikan petani tambak pada umumnya adalah Sekolah Menengah Atas, di mana terdapat 54 orang (46,2%) dari keseluruhan jumlah sampel (2) Tingkat pendapatan petani tambak pada umumnya berada pada kategori sedang, di mana terdapat 71 orang (60,7%) dari keseluruhan jumlah sampel (3) Status kepemilikan tambak petani tambak pada umumnya merupakan hak milik di mana terdapat 108 orang (92,3%) dari keseluruhan jumlah sampel (4) Partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep pada umumnya berada pada kategori cukup baik, di mana terdapat 47 orang (40,2%) dari keseluruhan jumlah sampel, dan (5) nilai $F_{hitung} (776,241) > F_{tabel} (2,68)$ dengan $dk = N-3 = 117-3 = 114$ pada taraf signifikasi 5% yang berarti bahwa tingkat pendidikan petani tambak (X_1), tingkat pendapatan petani tambak (X_2), status kepemilikan tambak (X_3) secara bersama-sama berpengaruh dan memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

Kata Kunci : Partisipasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Status Kepemilikan Tambak

ABSTRACT

M. JASMIN 2014. The Participation of Fish Farmers in Conserving Mangrove in Pangkep regency. (Survey of Fish Farmers in Pangkep Regency).

This study aims to determine the participation of fish farmers in conserving mangrove forests in Pangkep regency. The populations are 785 people. Sampling applied by random sampling with 117 people. Technique of collecting data obtained by interview and questionnaire guidelines. The result of the research are: (1) generally, the education level of fish farmers are senior high school, with 54 people (46,2%) of the overall samples. (2) The income level of fish farmers generally occurred in moderate category, with 71 people (60,7%) of the overall samples. (3) ownership status of the farm is generally proprietary, with 108 people (92,3%) of the overall samples. (4) the participation of fish farmers in conserving mangrove forests in Kabupaten Pangkep are good enough, with 47 people (40,2%) of the overall samples, and (5) Value $F_{\text{count}} (776,241) > F_{\text{tabel}} (2,68)$ with $dk = N-3 = 117-3 = 114$ at 5% significance level which means the educational level (X_1), the income level (X_2), the ownership status of the fish farmers (X_3) have effects and a positive relationship to the participation of fish farmers in conserving mangrove forests in Pangkep regency.

Key Words : The Participation, The Educational level, The Income Level and the Farm ownership status

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iv
PERNYATAAN KEORISINILAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Hutan Mangrove	10
B. Partisipasi Patani Tambak	19
C. Tingkat Pendidikan	25

D. Tingkat Pendapatan	28
E. Status Kepemilikan Tambak	31
F. Kerangka Pikir	40
G. Hipotesis Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Variabel dan Desain Penelitian	44
D. Defenisi Operasional Variabel	45
E. Instrumen Penelitian	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Penyajian Hasil Analisis Data	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	44
4.1 Distribusi Frekuensi dan Persentase Tingkat Pendidikan Petani Tambak di Kabupaten Pangkep	52
4.2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Tingkat Pendapatan Perbulan Petani Tambak di Kabupaten Pangkep	55
4.3 Distribusi Frekuensi dan Persentase Tingkat Pendapatan Petani Tambak di Kabupaten Pangkep	56
4.4 Status Kepemilikan Tambak Petani Tambak di Kabupaten Pangkep	58
4.5 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Partisipasi Petani Tambak dalam Melestarikan Hutan Mangrove di Kabupaten Pangkep	60
4.6 Interval Skor Partisipasi Petani Tambak dalam Melestarikan Hutan Mangrove di Kabupaten Pangkep	61
4.7 Uji Normalitas	63

4.8	Uji Multikolinieritas	63
4.9	Rangkuman Hasil Pengujian Regresi Linier Sederhana Pengaruh Variabel X_1 terhadap Variabel Y	64
4.10	Rangkuman Hasil Pengujian Regresi Linier Sederhana Pengaruh Variabel X_2 terhadap Variabel Y	66
4.11	Rangkuman Hasil Pengujian Regresi Linier Sederhana Pengaruh Variabel X_3 terhadap Variabel Y	67
4.12	Hasil Pengujian Regresi Linier Ganda antara Variabel X_1 , X_2 , dan X_3 , secara bersama-sama terhadap Variabel Y	68

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir	42
3.1 Desain Penelitian	45
4.1 Grafik Tingkat Pendidikan Petani Tambak di Kabupaten Pangkep	54
4.2 Garafik Pendapatan Per Bulan petani Tambak di Kabupaten Pangkep	57
4.3 Grafik Status Kepemilikan Tambak Petani Tambak di Kabupaten Pangkep	59
4.4 Grafik Partisipasi Petani Tambak dalam Melestarikan Hutan Mangrove Di kabupaten Pangkep	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian	81
Lampiran 2. Hasil Analisis Data	86
Lampiran 3. Dokumentasi	102
Lampiran 4. Persuratan	130
Lampiran 5. Riwayat Hidup	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia yang tiada ternilai harganya, termasuk didalamnya kawasan hutan mangrove dengan ekosistem yang sangat khas dan unik. Kekayaan alam hutan mangrove mempunyai potensi yang besar bagi kepentingan manusia.

Hutan mangrove adalah formasi hutan khas daerah tropika dan sedikit subtropika, terdapat di pantai rendah dan tenang, berlumpur, sedikit berpasir, serta mendapat pengaruh pasang surut air. Mangrove juga merupakan mata rantai penting dalam pemeliharaan keseimbangan siklus biologi di suatu perairan (Arief, Arifin. 2003).

Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan mangrove terbesar di dunia. Sebagian besar diantaranya terdapat di Irian Jaya (69 % dari jumlah total), Sumatra (16 %), Kalimantan (9 %), Sulawesi (2,4 %), Maluku (2,4 %), Jawa (1,2 %), dan Nusa Tenggara (0,2 %). Mangrove di Indonesia dikenal sebagai kawasan hutan sejenis yang paling beragam di dunia dan sekaligus merupakan pelabuhan bagi kehidupan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Sebanyak 189 jenis tumbuhan telah diketahui di kawasan mangrove Indonesia, di samping itu lebih dari 170 jenis burung juga diketahui hidup di kawasan ini termasuk beberapa jenis yang terancam kepunahan (Purnobasuki, 2005).

Hutan mangrove di Indonesia mengalami banyak persoalan karena terjadi perubahan-perubahan struktural akibat intervensi pembangunan yang dilakukan oleh banyak pihak. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem **hutan mangrove** di Indonesia antara lain pertumbuhan penduduk yang menyebabkan perubahan pemanfaatan **hutan mangrove** menjadi lahan untuk pemukiman, pertanian, pertambakan, dan industri. Kerusakan mangrove tersebut membawa dampak ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Berdasarkan data, sampai tahun 1995 diperkirakan terdapat 120.000 hektar mangrove di kawasan pesisir Sulawesi Selatan. Pada saat ini sudah lebih dari 80.000 hektar dibabat habis untuk diambil kayu produksi, kayu bakar, dan dikonversi menjadi tambak. Konversi dari hutan mangrove menjadi lahan tambak merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan pesisir yang umum di Sulawesi Selatan dan telah menimbulkan konflik penggunaan lahan yang serius.

Ekosistem hutan mangrove adalah tipe ekosistem yang terdapat di daerah pantai dan selalu atau secara teratur digenangi air laut atau dipengaruhi oleh pasang surut air laut, daerah pantai dengan kondisi berlumpur, berpasir, atau lumpur berpasir. Ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang khas untuk daerah tropis, terdapat di daerah pantai yang berlumpur dan airnya tenang (gelombang laut tidak besar). Ekosistem hutan itu disebut ekosistem hutan payau karena terdapat di daerah payau (estuarin), yaitu daerah perairan dengan kadar garam/salinitas antara 0,5 ‰ dan 30 ‰, disebut juga ekosistem hutan pasang surut karena terdapat di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Indriyanto, 2010).

Saat ini, hutan mangrove di dunia hanya tersisa sekitar 17 juta hektar, 22% dari luas tersebut terdapat di Indonesia, namun juga telah mengalami kerusakan, bahkan sebagian telah berubah status peruntungannya (Arief, 2003). Proses konversi mangrove menjadi tambak terjadi pula di pesisir Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Pangkep yang menjadi objek kajian penelitian. Selanjutnya, berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007, luas hutan mangrove di Sulawesi Selatan seluas 123.464 ha. Sebagian besar mengalami kerusakan yaitu sekitar 71.790 ha.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dicirikan dengan wilayah perairannya lebih luas dibandingkan daratannya, dengan perbandingan 1 berbanding 17. Kabupaten ini memiliki kawasan pesisir dan potensi mangrove yang sangat besar. Ekosistem mangrove terdapat di daerah pesisir daratan utama Kabupaten Pangkep yang merupakan sisa-sisa hutan mangrove yang tumbuh secara alami, atau di tanam oleh masyarakat di sekitar permukiman dan areal tambak. Adapun pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kawasan hutan mangrove tersebar di enam kecamatan yaitu Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Minasate'ne, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, dan Kecamatan Segeri. Luas hutan mangrove di wilayah Kabupaten Pangkep adalah 1.764 ha (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep, 2010). Sayangnya, banyak hutan mangrove mengalami kerusakan, bahkan hutan mangrove di wilayah ini kerusakannya mencapai 70 persen. Kerusakan ini sebagian besar disebabkan konversi lahan ke sektor tambang dan pembukaan lahan pertanian (Bahar, 2009).

Data dari jurnal ilmiah Indonesia (2007), memperkirakan bahwa hutan mangrove terus mengalami penurunan oleh perubahan fungsi hutan mangrove menjadi area pertambakan. Keberhasilan budi daya tambak udang windu pada awal tahun 1990-an menyebabkan terjadinya pertambahan luas tambak yang cukup besar di Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas tambak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 1991 adalah 7.779,4 ha dan meningkat menjadi 13.528,5 ha sampai pada tahun 2002. Penambahan luas tambak di kabupaten tersebut sebagian besar berasal dari konversi sawah dan sebagian lagi berasal dari konversi hutan mangrove yang ada di kawasan pesisir.

Berdasarkan pengamatan awal, di kawasan ini pembuatan tambak secara tradisional sudah dimulai sejak 50-an tahun silam. Pola tradisional itu mulai berubah menjadi tambak intensif dan telah menggunakan pupuk sejak tahun 1980-an yang diperkenalkan. Sejak saat itu, pertambakan di pesisir ini menjadi sangat tergantung pada pupuk yang mengakibatkan lingkungan tidak sanggup lagi menghasilkan nutrisi untuk ikan karena mangrovenya rusak. Padahal, mangrove mempunyai fungsi menyaring bahan pencemar yang disebabkan oleh penggunaan pupuk yang tidak sesuai fungsi dan kadarnya.

Manfaat dan fungsi hutan mangrove lainnya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang baik itu manfaat ekologi, manfaat ekonomi, manfaat fisik, manfaat biologi dan manfaat kimia maupun manfaat sosial sangat dirasakan dalam kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian-penelitian telah banyak dilakukan dan membuktikan

bahwa hutan mangrove memegang peranan penting bagi kehidupan di pesisir termasuk dalam peningkatan produktivitas tambak. Mangrove dapat meredam gelombang dan angin, pelindung dari abrasi dan pengikisan pematang tambak oleh air laut, penahan intrusi air laut ke darat, penahan lumpur dan perangkap sedimen. Di samping itu, mangrove juga sebagai penghasil detritus bagi plankton yang merupakan makanan utama biota laut termasuk ikan yang dibudidayakan di areal tambak. Hutan mangrove merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan siklus biologi di suatu perairan.

Menurut Turner (1977), dalam Chairil Anwar & Hendra Gunawan (2007) bahwa pembuatan 1 ha tambak ikan pada hutan mangrove alam akan menghasilkan ikan/udang sebanyak 287 kg/tahun, namun dengan hilangnya setiap 1 ha hutan mangrove akan mengakibatkan kerugian 480 kg ikan dan udang di lepas pantai per tahunnya. Dari sini tampak bahwa keberadaan hutan mangrove sangat penting bagi produktivitas perikanan, dan komponen yang harus ada, dijaga dan dilestarikan oleh petani tambak karena merupakan elemen yang sangat penting dan menunjang produktivitas dalam pengelolaan tambak.

Lebih lanjut Purnobasuki (2005), mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove sudah sejak lama secara turun temurun mengerti bahwa hutan mangrove merupakan sumber kehidupan mereka. Ketergantungan hidupnya untuk mencukupi kebutuhan pangan (ikan, udang, kepiting, kerang), kayu untuk pemukiman, kayu bakar, arang dan dedaunan dari

mangrove sangatlah ditentukan dari keberadaan hutan mangrove yang utuh dan berfungsi semestinya.

Peran penting hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat pesisir menyebabkan peningkatan eksploitasi terhadap hutan mangrove sehingga dari waktu ke waktu luas hutan mangrove semakin berkurang. Kordi (2012), kemudian menggolongkan faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya jumlah luas lahan hutan mangrove yaitu kemiskinan masyarakat pesisir, kepadatan penduduk pesisir, ekspansi modal, konsumsi berlebihan, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum.

Petani tambak sebagai subjek yang bersentuhan langsung dengan hutan mangrove dan merupakan keterwakilan dari masyarakat pesisir sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, keberadaan hutan mangrove disekeliling tambak dimanfaatkan secara beragam oleh petani tambak dan tingkat partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep masih fluktuatif. Menurunnya produksi tambak akibat limbah dan penyakit udang di Kabupaten Pangkep menjadikan tingkat pendapatan petani tambak juga menurun.

Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan petani tambak berdasarkan hasil observasi sangat bervariasi, diduga berpengaruh terhadap besar kecilnya partisipasi pelestarian hutan mangrove yang merupakan penjabaran dari faktor-faktor yang menyebabkan penurunan luasan hutan mangrove di Indonesia.

Hutan mangrove juga berperan dalam meredam besarnya ombak laut sehingga tidak langsung menerjang pantai (Purnobasuki, 2005). Hutan mangrove yang membatasi antara lautan dengan area tambak dapat mencegah dan melindungi area tambak dari terjangan ombak dan menjadi benteng hidup untuk kawasan tambak, sehingga sangat bermanfaat bagi petani tambak.

Status kepemilikan tambak yang dibedakan menjadi hak milik, hak pakai dan hak sewa juga diduga berpengaruh terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove, hal ini sangat berhubungan dengan apa yang dikemukakan Ikhlās (2012), yang membedakan bentuk perlakuan suatu benda berdasarkan status peruntukannya. Pengklasifikasian status kepemilikan suatu benda menunjukkan perbedaan yang lebih terperinci dalam mengelola benda tersebut. Semakin besar tingkat kepemilikan seseorang maka semakin tinggi juga bentuk perhatian dan hubungan terhadap benda tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti juga mencoba mengkaji kaitan antara status kepemilikan tambak oleh petani tambak terhadap kadar partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove yang dibedakan menjadi hak milik, hak sewa dan hak pakai.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba mengkaji tentang tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan status kepemilikan tambak petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah gambaran tingkat pendidikan petani tambak di Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimanakah gambaran tingkat pendapatan petani tambak di Kabupaten Pangkep?
3. Bagaimanakah gambaran status kepemilikan tambak petani tambak di Kabupaten Pangkep?
4. Bagaimanakah gambaran partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep?
5. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan status kepemilikan tambak terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan petani tambak di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui gambaran tingkat pendapatan petani tambak di Kabupaten Pangkep.

3. Untuk mengetahui gambaran status kepemilikan tambak petani tambak di Kabupaten Pangkep.
4. Untuk mengetahui gambaran partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan status kepemilikan tambak terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terutama untuk:

1. Sebagai salah satu masukan bagi pihak pemerintah di dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan bidang peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya bidang pengelolaan hutan mangrove.
2. Sebagai salah satu masukan bagi masyarakat (khususnya petani tambak di Kabupaten Pangkep dalam melestarikan hutan mangrove yang ada di daerah mereka).
3. Sebagai salah satu sumber informasi ilmiah bagi peneliti lainnya yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai masalah-masalah pengelolaan hutan mangrove.
4. Sebagai bagian pengambilan bahan ajar pada program studi Pendidikan Lingkungan Hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Mangrove

1. Pengetian Hutan Mangrove

Menurut Mac Nae, 1968 (dalam Arief, 2003), kata mangrove digunakan untuk menyebut jenis pohon-pohon atau semak-semak yang tumbuh di antara batas air tertinggi saat air pasang dan batas air terendah sampai di atas rata-rata air laut.

Mangrove merupakan suatu tipe hutan tropik dan subtropik yang khas, tumbuh sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landai. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Sedangkan di wilayah pesisir yang tidak bermuara sungai, pertumbuhan *vegetasi* mangrove tidak optimal (Dahuri, 2001).

Allen, 1973 (dalam Arief, 2003) mengatakan bahwa mangrove adalah suatu tempat yang bergerak akibat adanya pembentukan tanah lumpur dan daratan secara terus menerus oleh tumbuhan sehingga secara perlahan-lahan berubah menjadi semidataran. Mukhtasor (2007) menyebut mangrove sebagai vegetasi berjalan yang cenderung mendorong terbentuknya tanah timbul melalui

suksesi alami atau buatan dengan terbentuknya vegetasi baru pada tanah timbul tersebut.

Hutan mangrove adalah tetumbuhan halofit yang tumbuh di daerah pasang surut sepanjang areal pantai, di antara seluruh sistem makrofit laut, mangrove adalah satu-satunya kelompok tumbuhan yang memiliki aerial biomass dan ditemukan mulai dari daerah yang dipengaruhi oleh pasang tertinggi sampai setara ketinggian rata-rata air laut, terhampar mulai dari daerah tropis sampai beberapa daerah subtropis (Chapman, 1976; Ariel & Snedaker, 2003).

Snedaker, 1978 (dalam Arief, 2003) memberikan pengertian yang panjang mengenai hutan mangrove, yakni suatu kelompok jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropika dan subtropika yang terlindung dan memiliki semacam bentuk lahan pantai dengan tipe tanah anaerob. Hutan mangrove adalah hutan dengan vegetasi yang hidup di muara sungai, daerah pasang surut, dan tepi laut (Baehaqie & Indrawan, 1993).

Mangrove tidak tumbuh di pantai yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut yang kuat karena hal ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur dan pasir, substrat yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Ada lima faktor utama yang mempengaruhi zonasi di kawasan pantai tertentu, yaitu: (1) gelombang, yang menentukan frekuensi tergenang; (2) salinitas, yang berkaitan dengan hubungan osmosis mangrove; (3) substrat; (4) pengaruh darat, seperti aliran air masuk dan rembesan air tawar; (5) ketebukaan terhadap

gelombang, yang menentukan jumlah substrat yang dapat dimanfaatkan (Mukhtasor, 2007).

2. Ekosistem dan Fungsi Hutan Mangrove

Menurut Indriyanto (2010) mengatakan ekosistem hutan mangrove adalah tipe ekosistem yang terdapat di daerah pantai dan selalu atau secara teratur digenangi air laut atau dipengaruhi oleh pasang surut air laut, daerah pantai dengan kondisi tanah berlumpur, berpasir, atau lumpur berpasir. Ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang khas untuk daerah tropis, terdapat di daerah pantai yang berlumpur dan airnya tenang (gelombang laut tidak besar).

Arief (2003) mengartikan mangrove sebagai formasi hutan khas daerah tropika dan sedikit subtropika, terdapat di pantai rendah dan tenang, berlumpur, sedikit berpasir, serta mendapat pengaruh pasang surut air laut. Mangrove juga merupakan mata rantai penting dalam memelihara keseimbangan siklus biologi di suatu perairan.

Vegetasi yang terdapat dalam ekosistem hutan mangrove didominasi oleh tetumbuhan yang mempunyai akar napas atau *pneumatofora*. Di samping itu, spesies tumbuhan yang hidup dalam ekosistem hutan mangrove adalah spesies tumbuhan yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap salinitas payau dan harus hidup pada kondisi lingkungan yang demikian, sehingga spesies tumbuhannya disebut tumbuhan *halophytes obligat*. Tetumbuhan yang ada atau dijumpai pada ekosistem hutan mangrove terdiri dari

12 genus tumbuhan berbunga antara lain genus *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Xylocarpus*, *Lumnitzera*, *Laguncularia*, *Aegiceras*, *Aegiatilis*, *Snaeda*, dan *Conocarpus* (Indriyanto, 2010).

Mac Nae (1968 dalam Suprihartono, 2000) membagi zona mangrove berdasarkan jenis pohon ke dalam enam zona, yaitu: (1) zona perbatasan dengan daratan; (2) zona semak-semak tumbuhan *Ceriops*; (3) zona hutan *Bruguiera*; (4) zona hutan *Rhizophora*; (5) zona *Avicennia* yang menuju ke laut; dan (6) zona *Sonneratia*. Sementara Watson (1928 dalam Anwar, 1984) membagi hutan mangrove menjadi lima zona berdasarkan frekuensi air pasang, yaitu:

1. Hutan yang paling dekat dengan laut ditumbuhi oleh *Avicennia* dan *Sonneratia*. *Sonneratia* tumbuh pada lumpur lembek dengan kandungan organik yang tinggi. *Avicennia marina* tumbuh pada substrat berliat yang agak keras, sedangkan *Avicennia alba* tumbuh pada substrat yang agak lembek.
2. Hutan pada substrat yang sedikit lebih tinggi biasanya dikuasai *Bruguiera cylindrica*. Hutan ini tumbuh pada tanah liat yang cukup keras dan dicapai oleh beberapa air pasang saja.
3. Ke arah daratan lagi hutan dikuasai oleh *Rhizophora mucronata* dan *Rhizophora apiculata*. *Rhizophora mucronata* lebih banyak dijumpai pada kondisi yang agak basah dan lumpur yang agak dalam. Pohon-pohon dapat tumbuh setinggi 35 - 40 m. Pohon lain yang juga terdapat pada hutan ini mencakup *Bruguiera parviflora* dan

Xylocarpus granatum. Gundukan lumpur yang dibuat oleh udang lumpur ditumbuhi oleh pakis piai.

4. Hutan yang dikuasai oleh *Bruguiera paviflora* kadang-kadang dijumpai tanpa jenis pohon lainnya. Dalam hutan ini juga dijumpai pohon *Rhizophora* yang telah ditebang.
5. Hutan mangrove terakhir dikuasai oleh *Bruguera gymnorhiza*. Selain pohon ini toleran terhadap naungan pada kondisi dimana *Rhizophora* tidak dapat tumbuh, seperti pohon cemara, semaian *Bruguiera gymnorhiza* tidak mampu tumbuh dibawah induknya. Peralihan antara hutan ini dan hutan dataran ditandai dengan adanya *Lumnitzera racemosa*, *Xylocarpus moluccensis*, *Intsia bijunga*, *Ficus retusa*, rotan, pandan dan nibong panatai, *Oncoperma tigillaria*.

Secara garis besar, penjelasan bahwa hutan mangrove mempunyai beberapa keterkaitan dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai penyedia bahan pangan, papan, dan kesehatan serta lingkungan dibedakan menjadi lima, yaitu fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi ekonomi dan fungsi lain (wanawisata).

Fungsi fisik kawasan hutan mangrove menurut Arief (2003) adalah; (1) menjaga garis pantai tetap stabil, (2) melindungi pantai dan tebing dari proses erosi atau abrasi, serta menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat, (3) menahan sedimen secara periodik sampai terbentuk lahan baru, dan (4)

sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke darat, atau sebagai filter air asin menjadi tawar.

Lebih Lanjut, Arief (2003) menjelaskan fungsi kimia kawasan mangrove antara lain; (1) sebagai tempat terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan oksigen, (2) sebagai penyerap karbon dioksida, (3) sebagai pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran industri dan kapal-kapal di lautan. Sedangkan fungsi biologi kawasan mangrove yaitu; (1) sebagai penghasil bahan pelapukan yang merupakan sumber makanan penting bagi invertebrata kecil pemakan bahan pelapukan (detritus), yang kemudian berperan sebagai sumber makanan bagi hewan yang lebih besar, (2) sebagai kawasan pemijah atau asuhan bagi udang, kepiting, kerang, dan sebagainya, yang setelah dewasa akan kembali ke lepas pantai, (3) sebagai kawasan untuk berlindung, bersarang, serta berkembang biak bagi burung dan satwa lain, (4) sebagai sumber plasma nutfah dan sumber genetika, (5) sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut lainnya.

Sedangkan secara ekonomi, kawasan mangrove merupakan sumber devisa, baik bagi masyarakat, industri, maupun bagi negara seperti penghasil kayu dan penghasil bibit ikan. Di samping fungsi tersebut, mangrove juga sebagai kawasan wisata alam dengan keindahan vegetasi dan satwa serta sebagai tempat pendidikan, konservasi dan penelitian (Arief, 2003).

3. Pelestarian Hutan Mangrove

Pada dasarnya terdapat tiga pilihan untuk pengelolaan dan pengembangan mangrove: (1) Perlindungan ekosistem dalam bentuk aslinya; (2) Pemanfaatan ekosistem untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa yang didasarkan pada prinsip kelestarian; (3) Pengubahan (atau perusakan) ekosistem alami, biasanya untuk suatu pemanfaatan tertentu.

Pada kenyataannya, pertimbangan ekonomi dan ekologis tidak dapat dipisahkan dalam mengevaluasi berbagai alternatif pengelolaan mangrove. Pernyataan ini mencerminkan tumbuhnya apresiasi makna ekonomi ekosistem mangrove. Karenanya, konservasi dan pemanfaatan mangrove tergantung sepenuhnya pada perencanaan yang terintegrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan ekosistem mangrove. Usulan pengembangan dan kegiatan insidental yang mempengaruhi ekosistem mangrove hendaknya mencerminkan perencanaan dan pengelolaan sebagai berikut (Dahuri *dkk.*, 2001):

1. Peliharalah dasar dan karakter substrat hutan dan saluran-saluran air.
2. Jaga kelangsungan pola-pola alamiah; skema aktivitas siklus pasang surut serta limpasan air tawar.
3. Peliharalah pola-pola temporal dan spasial alami dari salinitas air permukaan dan air tanah.
4. Peliharalah keseimbangan alamiah antara penambahan tanah, erosi dan sedimentasi.

5. Tetapkan batas maksimum untuk seluruh hasil panen yang dapat diproduksi.
6. Pada daerah-daerah yang mungkin terkena tumpahan minyak dan bahan-bahan beracun lainnya, harus memiliki rencana penanggulangan.
7. Hindarkan semua kegiatan yang mengakibatkan pengurangan (*impound*) areal mangrove.

Sedangkan kata pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, dan bertahan kekal. Kemudian mendapat tambahan *pe* dan akhiran *an*, menjadi pelestarian yang berarti; (1) proses, cara, perbuatan melestarikan; (2) perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi; (3) pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Pelestarian kawasan hutan mangrove menurut Purnobasuki (2005) harus dikaji dan dirumuskan berdasarkan hal-hal berikut:

1. Kepentingan pengelolaan kawasan mangrove didasarkan pada peruntukannya menurut fungsi produksi, kawasan lindung, suaka alam, serta kepentingan konservasi menjadi areal pertambakan, kawasan industri, pemukiman dan wisata.
2. Kepastian hukum dalam penggunaan lahan mangrove.

3. Luasan yang diperlukan untuk masing-masing peruntukan (persentase terhadap luas hutan mangrove yang ada).
4. Cara pengaturan tat ruang dari pihak-pihak yang terlibat.
5. Penetapan otoritas pengelolaan yang mempunyai kekuatan hukum (sebagai konsep ajuan kepada pemerintah).
6. Inventarisasi kembali terhadap penggunaan lahan mangrove yang telah ada.
7. Inventarisasi pelaksanaan reboisasi yang sedang berjalan maupun yang sudah berhasil.

Ekosistem mangrove yang rusak dapat dipulihkan dengan cara restorasi/rehabilitasi dengan menggunakan pendekatan *bottom-up*. Dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem mangrove masyarakat pesisir secara keseluruhan perlu mendapat pengertian bahwa hutan mangrove yang akan mereka rehabilitasi akan menjadi milik masyarakat dan untuk masyarakat, khususnya yang berada di daerah pesisir. Pelibatan masyarakat secara penuh membuat masyarakat merasa mempunyai andil dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove tersebut, sehingga status mereka akan berubah, yaitu bukan sebagai kuli lagi melainkan ikut memilikinya. Dari sini akan tergambar andaikata ada sekelompok orang yang bukan anggota masyarakat yang ikut menanam hutan mangrove tersebut ingin memotong sebatang tumbuhan mangrove saja, maka mereka tentu akan ramai-ramai mencegah atau mengingatkan bahwa mereka menebang pohon tanpa ijin.

Hasil dari kegiatan dengan pendekatan *bottom up* ini akan menjadikan masyarakat enggan untuk merusak hutan mangrove yang telah mereka tanam, sekalipun tidak ada yang mengawasinya; karena masyarakat sadar bahwa kayu yang mereka potong tersebut sebenarnya adalah milik mereka bersama. Tugas pemerintah hanyalah memberikan pengarahan secara umum dalam pemanfaatan hutan mangrove secara berkelanjutan, sebab tanpa arahan yang jelas nantinya akan terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan dalam jangka panjang.

B. Partisipasi Petani Tambak

Kata partisipasi merupakan suatu istilah yang banyak di gunakan dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi berasal dari bahasa latin yang berbentuk kata kerja “*participere*” yang bermakna peran serta atau menjadi terlihat. Partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri sendiri lebih daripada keterlibatan fisik saja akan tetapi lebih dulu lagi yakni mencakup pikiran, perasaan dan kemauan (Sastropetro, 1997).

Adjid (1985) dalam Waji (2002), bahwa kriteria yang tercakup dalam istilah partisipasi adalah:

1. Partisipasi mengacu pada adanya beberapa obyek yang berinteraksi, misalnya individu, masyarakat, organisasi, perekonomian dan pemerintahan yang masing-masing mempunyai keleluasaan untuk mengambil keputusan-keputusan sendiri-sendiri tetapi terkait dalam suatu ikatan solidaritas tertentu;

2. Terdapat kesukarelaan dan kesadaran dari individu untuk menjalankan peranan yang diberikan oleh organisasi secara iklas.
3. Partisipasi bermakna kepada keterlibatan anggota masyarakat dalam proses suatu kegiatan;
4. Adanya kelompok sasaran dari suatu kegiatan yang menjadi ajang partisipasi.

Selanjutnya Muryono dkk (2000), mengartikan peran serta atau partisipasi masyarakat pada hakekatnya adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi/individu atau kelompok yang diorganisasikan serta berlandaskan kemampuan yang memadai, turut serta memutuskan tujuan dengan penuh rasa tanggung jawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki.

Azis (2006) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat baik secara individu atau perorangan maupun kelompok secara aktif serta penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Partisipasi adalah suatu gejala demokratis dari perilaku manusia dalam perencanaan serta pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi lebih baik dalam bidang-bidang fisik maupun mental serta penentuan kebijaksanaan (Fajar, 2011).

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove adalah sebagai keterlibatan dan keikutsertaan petani tambak secara sadar baik secara fisik dan moral dengan tujuan tertentu dalam pelestarian hutan mangrove.

Ndraha (1999) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu: (1) ikut memberikan masukan dalam proses pembangunan, menerima imbalan atas masukan tersebut dan menikmati hasil pembangunan, (2) ikut memberikan masukan dan ikut menikmati hasil pembangunan, (3) ikut memberikan masukan dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan, (4) menikmati hasil pembangunan tanpa memberikan masukan, dan (5) memberikan masukan tanpa menerima imbalan dan tidak ikut menikmati hasil pembangunan.

Daniel dkk (2005) mengemukakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu: (1) masyarakat ikut melaksanakan kegiatan, (2) masyarakat ikut menghadiri pertemuan perencanaan, pelaksanaan, (3) masyarakat ikut dalam pengambilan keputusan tentang cara pelaksanaan dan (4) masyarakat ikut dalam setiap tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring.

Pretty & Hart (dalam Sondita, 2005) mengemukakan tingkat partisipasi sebagai berikut: (1) partisipasi pasif bilamana masyarakat hanya datang mendengarkan penjelasan, (2) partisipasi aktif jika masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi.

Adapun Raharjo (dalam Seniwati, 2009) membagi partisipasi dalam dua bentuk, yaitu (1) partisipasi horisontal yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan, (2) partisipasi vertikal yaitu partisipasi yang dilakukan antara bawahan dengan atasan, antara klien dan patron, dan antara masyarakat dan pemerintah.

Beberapa bentuk partisipasi, menurut Daniel dkk (2005) antara lain: (1) inisiatif/spontan, merupakan bentuk partisipasi paling alami, dan masyarakat secara spontan melakukan aksi bersama, (2) fasilitasi, yaitu suatu partisipasi masyarakat yang disengaja dirancang dan didorong untuk menyelesaikan suatu masalah bersama, (3) induksi, partisipasi masyarakat melalui propaganda, (4) koptasi, yaitu partisipasi masyarakat karena ingin mendapatkan keuntungan materi dan pribadi yang telah disiapkan untuk mereka, (5) dipaksa, partisipasi masyarakat karena adanya tekanan atau sanksi dari penguasa.

Selanjutnya Slamet (1989) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua bentuk berdasarkan derajat kesukarelaan, yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seseorang melibatkan dirinya secara sukarela dalam suatu kegiatan masyarakat. Partisipasi ini ada dua yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi terpaksa yaitu keikutsertaan seseorang karena terpaksa baik oleh keadaan sosial, ekonomi maupun tuntutan peraturan dan hukum.

Melibatkan masyarakat secara aktif berarti memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada masyarakat untuk merumuskan masalah-masalah mereka, memobilisir sumber-sumber setempat dan mengembangkan kelompok-kelompok

setempat. Pemberian tanggung jawab ini tidak mudah, oleh karena itu dilakukan secara bertahap melalui proses yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan sendiri (Bimo, 1985).

Sesungguhnya, pemerintah telah lama menyadari bahwa partisipasi masyarakat adalah elemen dan modal sosial yang penting dalam pembangunan. Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional (SPPN) menyebutkan, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan pembangunan (Fajar, 2011).

Menurut Mubyanto (dalam Ndraha, 1999) adanya partisipasi masyarakat akan membawa pengaruh positif, di mana mereka akan bisa memahami atau mengerti berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam elemen partisipasi masyarakat yang harus dipenuhi adalah adanya komunikasi dua arah yang terus menerus dan informasi yang berkenaan dengan proyek, program atau kebijakan disampaikan dengan bermacam-macam teknik yang tidak hanya pasif dan normal tetapi juga aktif dan informal.

Kelompok masyarakat yang terlibat dan bersentuhan langsung dengan ekosistem mangrove adalah petani tambak. Pemberdayaan petani tambak dalam merumuskan kegiatan pelestarian hutan mangrove suatu pendekatan yang fleksibel, sabar, dan butuh waktu. Membangun pemahaman dan keyakinan petani tambak terhadap pentingnya pengelolaan hutan mangrove sangat memakan waktu. Namun

hal di atas, sebanding dengan perolehan hasil dalam jangka panjang karena dapat membangun rasa kepemilikan dan komitmen petani tambak yang kuat karena kebutuhannya akan hutan mangrove merupakan jaminan berkelanjutan rehabilitasi hutan mangrove.

Upaya pelibatan masyarakat yang berarti dan berkelanjutan dalam pengelolaan dan rehabilitasi sumberdaya pesisir tidak dapat dicapai hanya melalui satu program yang dibatasi oleh ruang lingkup area serta kerangka tenggang waktu yang terbatas (Claridge & O,Callaghan, dalam Seniwati 2007).

Partisipasi jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka partisipasi petani tambak adalah keikutsertaan petani tambak sebagai bagian dari masyarakat secara sukarela berkorban untuk memberikan kontribusi secara fisik, mental dan materi dalam suatu proses kegiatan dengan tujuan mendapatkan hasil pengelolaan hutan mangrove.

Menurut Sondita (2005), bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat selalu didasari oleh tingkat kepentingan, tingkat pendidikan, materi dan tanggung jawab moral manusia terhadap suatu keadaan. Bentuk partisipasi yang jika dikaitkan dengan penelitian ini, tingkat pendidikan dan materi (bentuk dari tingkat pendapatan petani tambak) menjadi variabel yang sangat kompoten dalam setiap indicator penilaian terhadap besar kecilnya bentuk partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove. Status kepemilikan tambak sebagai keterwakilan dari undur kepentingan juga menjadi variabel yang sangat mempengaruhi partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

C. Tingkat Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengisyaratkan secara jelas pada Pasal 1 ayat (1) bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Demikian juga pada Pasal 3 dijelaskan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggungjawab.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.

Nuraini (2002) mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pengembangan kemampuan, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat yang juga

merupakan suatu proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.

Crow (dalam Supriyatno, 2001) mengatakan bahwa pendidikan diinterpretasikan dengan makna untuk mempertahankan individu dengan kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa bertambah dan merupakan suatu harapan untuk dapat mengembangkan diri agar berhasil serta untuk memperluas, mengintensifkan ilmu pengetahuan dan memahami elemen-elemen yang ada disekitarnya. Pendidikan juga mencakup segala perubahan yang terjadi sebagai akibat dari partisipasi individu dalam pengalaman-pengalaman dan belajar.

Sementara itu, Abdullah (2001) mengemukakan bahwa pendidikan adalah segala sesuatu di dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang, sehingga pendidikan itu dapat diartikan sebagai pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendidikan dapat didefensikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya.

Tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. (Wikipedia Indonesia, 2009). Jadi yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan formal atau akademis.

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

1. Pendidikan Usia Dini: Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam hal ini dapat berbentuk sekolah playgroup atau taman kanak-kanak.
2. Pendidikan Dasar: Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yaitu meliputi Sekolah Dasar (SD) dan sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat.
3. Pendidikan Menengah: Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun, yaitu meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajatnya.
4. Pendidikan Tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mata pelajaran pada perguruan tinggi merupakan penjurusan dari SMA, akan tetapi semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan adalah jenjang atau strata pendidikan melalui proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, untuk mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis demi peningkatan kemampuan diri dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Jadi tingkat pendidikan petani tambak adalah jenjang atau strata pendidikan yang dilakukan oleh petani tambak melalui proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, untuk mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis demi peningkatan kemampuan diri dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu.

D. Tingkat Pendapatan

Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, sangat berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh. Menurut Rahardja (2006) mengatakan bahwa pendapatan adalah total penerimaan yang diperoleh seseorang atau rumah tangga sebagai dampak dari kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu tanpa mengurangi harta yang telah dimilikinya, lebih lanjut dikatakan bahwa wujud dari pendapatan adalah dalam bentuk uang dan barang. Pendapat senada diungkapkan oleh Kadarya (1991) mengatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa upah/gaji, bunga, sewa, deviden, keuntungan atau laba, dan suatu arus uang yang diukur pada periode waktu tertentu.

Selanjutnya Patang (2004) mengatakan bahwa pendapatan seseorang dapat diamati melalui dua pengertian, yaitu: (1) pendapatan sebagai selisih atau beda antara pemasukan dan pengeluaran yang dikorbankan untuk memperoleh penghasilan tersebut (pendapatan kotor), dimana di dalamnya masih terdapat nilai untuk bunga dan angsuran modal yang diinvestasikan ataupun nilai penyusutan alat yang digunakan responden; dan (2) pendapatan sebagai dampak kegiatan ekonomi atau balas jasa atas korbanan faktor-faktor produksi setelah dikurangi bunga dan angsuran.

Dari beberapa pandangan para ahli ekonomi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan adalah sebuah output dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau rumah tangga yang bersumber dari modal sendiri maupun dari pemilik modal, dan sangat ditentukan oleh produktifitas seseorang.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) mengatakan bahwa salah satu indikator ekonomi yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui gambaran kesejahteraan dan kemakmuran suatu wilayah adalah pendapatan perkapita. Pendapatan seseorang atau keluarga (pendapatan perkapita) adalah pendapat yang diterima seseorang atas kegiatan yang dilakukan baik yang bersumber dari pendapatan keluarga maupun pendapatan dan tergantung pada kualitas faktor-faktor ekonomi yang diterima. Dengan demikian pendapatan merupakan faktor yang sangat penting tingkat hidup dan status ekonomi rumah tangga.

Lebih jauh, Yafet (2004) mengatakan bahwa tingkat pendapatan merupakan besar kecilnya penghasilan yang diperoleh dalam sebuah keluarga ataupun seseorang

dalam sebulan. Tingkat pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan untuk turut berperan dalam berbagai aspek pembangunan termasuk di dalamnya turut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.

Pendapatan merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia maupun meningkatkan taraf hidup manusia lainnya. Pendapatan masyarakat yang rendah akan membawa akses yang rendah terhadap pendidikan dan kesehatan dan akan mempengaruhi produktifitas kerja masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan membawa akses dan kesempatan untuk menyediakan sandang, pangan, dan papan serta dapat menyimpan sebagian pendapatan untuk kehidupan selanjutnya. Pendapatan yang tinggi akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang sehat, karena semakin memperbesar partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Benyamin, 2003).

Berdasarkan sumbernya, pendapatan dapat dibagi menurut bentuknya, yaitu pendapatan berupa uang antara lain: (1) upah gaji, (2) pendapatan dari jenis usaha, (3) pendapatan dari hasil lahan jika ada, (4) sewa lahan, (5) sewa-sewa yang lain, (6) sumbangan dari berbagai pihak. Pendapatan dalam bentuk barang atau jasa antara lain: (1) penerimaan makanan, (2) kegiatan usaha, (3) bagi hasil lahan pertaian, (4) penerimaan lain-lain.

Sajogyo (dalam Benyamin, 2003) menyatakan bahwa untuk menghitung tingkat pendapatan suatu rumah tangga dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode penerimaan dan metode pengeluaran. Dengan metode penerimaan, pendapatan rumah tangga diperoleh dengan jalan menjumlahkan semua penerimaan

anggota rumah tangga dalam kurun waktu, baik yang diperoleh dari usaha pokok maupun sampingan. Dengan metode pengeluaran, pendapatan rumah tangga yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh anggota rumah tangga dalam suatu kurun waktu. Kedua metode ini masing-masing mempunyai kelemahan, dengan menggunakan metode penerimaan seringkali menggambarkan suatu gejala yang *understated*, sedangkan dengan menggunakan metode pengeluaran seringkali *overstated*.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendapatan petani tambak adalah jumlah penghasilan yang diperoleh oleh seseorang petani tambak dalam bentuk uang atau benda baik yang bersumber atas modal sendiri maupun dari upah yang diperoleh dari pekerjaan lain dalam kurung waktu tertentu.

E. Status Kepemilikan Tambak

Secara historis, penyebaran dan peningkatan jumlah penduduk yang menguasai kawasan pantai di Indonesia dimulai oleh para pedagang/nelayan atau para penyar agama yang sering berlayar baik dari negara lain maupun yang berpindah-pindah dari pulau yang satu ke pulau-pulau lainnya. Secara berangsur-angsur sebagian dari mereka menetap dan menguasai lahan pada kawasan pantai yang diantaranya berupa hutan mangrove. Sampai saat ini sulit untuk melakukan pendataan kepemilikan lahan di kawasan pantai, karena sejarah, kondisi sosial-budaya dan faktor lain yang mengakibatkan masyarakat tradisional penghuni pantai berpindah-pindah. Pada perkembangan kepemukiman masyarakat pantai tersebut, saat ini perubahan status fungsi dan kepemilikan kawasan pantai dan hutan mangrove

di wilayah-wilayah pesisir dihadapkan pada masalah-masalah belum adanya pengaturan oleh pemerintah tentang status kepemilikan lahan, pengerukan dan reklamasi muara sungai dan pantai (DEPHUT, 2011).

Pengetahuan tentang status fungsi dan kepemilikan lahan pada kawasan pantai dan hutan mangrove sangat penting dalam mengupayakan koordinasi terpadu dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Berdasarkan perkembangan pembangunan wilayah perkotaan dan desa pantai, peruntukan dan kepemilikan lahan pada kawasan pantai dan hutan mangrove sangat bervariasi, sesuai dengan kondisi biofisik, sosial ekonomi dan tingkat peradaban masyarakat setempat. Oleh karenanya, perubahan-perubahan fungsi dari status kepemilikan lahan tersebut harus diluruskan dan didukung dengan penyempurnaan peraturan perundangan.

Berdasarkan sejarah perkembangan dan penyebaran penduduk di wilayah pesisir pantai, keinginan untuk membudidayakan ikan dan udang dalam bentuk tambak secara besar-besaran bagi masyarakat pantai tradisional adalah akibat tuntutan perkembangan ekonomi. Masyarakat nelayan yang sebelumnya hidup secara subsisten dan tradisional kini sudah banyak yang berubah menjadi petani-petani tambak dan pedagang dengan orientasi keuntungan dan pendapatan setinggi-tingginya. Perkembangan pergaulan dan transformasi kemajuan peradaban manusia dari berbagai benua dan kepulauan yang dialami oleh masyarakat pantai Indonesia, telah membawa perubahan sikap, kebiasaan dan serta mendorong mereka untuk mengeksploitasi sumberdaya alam pantai dan hutan mangrove. Masyarakat tersebut

semakin berantusias untuk merombak hutan-hutan mangrove menjadi tambak ikan dan udang.

Status kepemilikan tambak adalah hak sah oleh hukum atas lahan berupa tambak pada suatu daerah tertentu untuk dikelola sesuai fungsinya demi tujuan tertentu. Menurut Undang-undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok atas tanah. Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa hak-hak atas tanah meliputi; hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak diluar itu sesuai disebutkan dalam pasal 53. Hak kepemilikan tanah yang berkaitan dengan penelitian ini kita batasi antara lain hak milik, hak pakai dan hak sewa tanah.

1. Hak Milik

Ketentuan Umum mengenai hak milik diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, 20 s/d 27, 50 ayat (1), 56 UUPA. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan memperhatikan fungsi sosial tanah. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek hak milik. Artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat

menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Dalam UUPA disebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki hak milik. Selain itu, pemerintah dapat menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik beserta syarat-syaratnya. **Hak milik** ini hanya dapat hilang jika objek tanah yang bersangkutan musnah (karena bencana dan lain-lain) atau diambil negara. *Hak milik* dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Subyek yang dapat mempunyai tanah Hak Milik menurut UUPA dan peraturan pelaksanaanya, adalah:

1. Perseorangan

WNI, baik pria maupun wanita, tidak berwarganegaraan rangkap;

2. Badan-badan hukum tertentu

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara, koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan sosial (lihat Pasal 21 (2) UUPA, PP No.38/1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah, Permen Agraria/Kepala BPN No. 9/1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan). Hak milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagai mana disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu:

1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat;

- Terjadi karena Pembukaan tanah (pembukaan hutan);
 - Terjadi karena timbulnya Lidah Tanah.
2. Hak milik Atas tanah tertajdi karena penetapan pemerintah;
- Pemberian hak baru (melalui permohonan);
 - Peningkatan hak.
3. Hak milik atas tanah terjadi karena Undang-undang;
- Ketentuan Konversi Pasal I, II. VI.

Sedangkan sifat dan ciri-ciri hak milik berdasarkan UUPA anata lain: (1) tergolong hak yang wajib didaftarkan menurut PP No. 24/1997; (2) dapat diwariskan; (3) dapat dialihkan, seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, lelang, penyertaan modal; (4) turun temurun; (5) dapat dilepaskan untuk kepentingan sosial; (6) dapat dijadikan induk hak lain; dan (7) dapat dijadikan jamninan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Sedangkan terhapusnya hak milik diatur pada Pasal 27 UUPA yaitu penetapan faktor-faktor penyebab hapusnya hak milik atas tanah dan tanahnya jatuh kepada negara, yaitu; (1) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA; (2) dilepaskan secara suka rela oleh pemiliknya; (3) dicabut untuk kepentinga umum; (4) tanahnya ditelantarkan; (5) karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai sunyek hak milik atas tanah; (6) karena peralihan hak yang mengakibatkantanahnya berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah; (7) tanahnya musnah, misalnya terjadi bencana alam.

2. Hak Pakai

Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), **Hak pakai** adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, sebagai sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Subjek atau yang dapat memiliki hak pakai antara lain: (1) WNI; (2) orang asing yang bkedudukan di Indonesia; (3) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; (4) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat berwenang.

Hak pakai dapat terjadi karena; (1) penetapan pemerintah (tanah negara dan tanah hak pengelolaan); (2) perjanjian pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT; (3) Undang-undang, ketentuan tentang konversi. Jangka waktu hak pakai dibedakan sesuai dengan asal tanahnya anata lain: (1) hak pakai atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu

paling lama 20 tahun, dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Khusus hak pakai yang dipunyai oleh departemen, lembaga non departemen, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu; (2) hak pakai atas tanah hak milik berjangka waktu paling lama 25 tahun, tidak ada perpanjangan waktu. Namun, atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak pakai dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan pada kantor BPN setempat

Sedangkan kewajiban pemegang hak pakai berdasarkan UUPA antara lain: (1) membayar uang pemasukan kepada negara, perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau hak milik; (2) menggunakan tanah sesuai peruntukannya sesuai keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau hak milik; (3) memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; (4) menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai habis; (5) menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah habis kepada kepala kantor pertanahan (6) memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurang oleh tanah hak pakai.

Hak pemegang hak pakai yang diatur dalam UUPA antara lain: (1) menguasai dan mempergunakan tanah selama waktu tertentu untuk keperluan

pribadi atau usahanya; (2) memindahkan hak tersebut kepada pihak lain. (3) membebani dengan hak tanggungan.; (4) menguasai dan menggunakan tanah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

UUPA juga mengatur tentang sifat dan ciri-ciri hak pakai yaitu antara lain: (1) tergolong hak yang wajib didaftarkan menurut PP No. 24/1997; (2) dapat diwariskan; (3) dapat dialihkan , seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, lelang, penyertaan modal; (4) dapat dilepaskan untuk kepentingan social; (5) dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan; (6) haknya mempunyai jangka waktu tertentu; (7) dapat berinduk pada hak atas tanah yang lain; (8) peruntukkannya terbatas. Sedangkan terhapusnya hak pakai antara lain disebabkan oleh: (1) jangka waktunya berakhir; (2) dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhir, karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam hak pakai dan tidak terpenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak antara pemegang hak pakai dengan pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik. Serta putusan pengadilan yang berkekuatan tetap; (3) dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya; (4) dicabut untuk kepentingan umum; (5) ditelantarkan; (6) tanahnya musnah; (7) pemegang hak pakai tidak memenuhi syarat sebagai subyek pemegang hak pakai.

3. Hak Sewa

Hak sewa adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk menggunakan atau mengelola tanah atas tanah hak milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan penyewa. Ketentuan mengenai pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau tiap-tiap waktu tertentu. Juga dapat dilakukan sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan oleh pemegang HSUB. Tergantung kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak sewa. Pada dasarnya pemegang hak sewa tidak diperbolehkan mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik tanah. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat berakibat terputusnya hubungan sewa-menyewa antara pemilik tanah dan pemegang hak sewa.

Sifat dan cirri-ciri dari hak sewa yaitu: (1) tujuan penggunaannya sementara, artinya jangka waktu terbatas; (2) bersifat pribadi dan tidak boleh dialihkan; (3) tidak dapat diwariskan; (4) hubungan hak sewa tidak terputus dengan dialihkannya hak milik yang bersangkutan kepada pihak lain. (5) tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan; (6) pemegang hak sewa dapat melepas sendiri hak sewanya; (7) tidak termasuk golongan hak-hak yang harus didaftarkan.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terhapusnya hak sewa adalah: (1) jangka waktunya berakhir; (2) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena pemegang hak sewa tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak sewa;

(3) dilepaskan oleh pemegang hak sewa sebelum jangka waktu berakhir; (4) hak milik atas tanahnya dicabut untuk kepentingan umum; (5) tanahnya musnah.

F. Kerangka Pikir

Kabupaten Pangkep merupakan kabupaten yang memiliki banyak pulau dengan garis pantai yang panjang dan memiliki potensi hutan mangrove yang besar yang perlu dilestarikan. Secara teoritis pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa keterlibatan petani tambak sebagai subjek yang terlibat langsung dengan pengelolaan hutan mangrove sangat dibutuhkan. Para ahli berpendapat bahwa, perubahan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat sentralistik harus ditinggalkan dan digantikan dengan sistem desentralisasi dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk memanfaatkan potensi di daerahnya masing-masing termasuk hutan mangrove yang semestinya dikelola oleh petani tambak sebagai masyarakat yang bersentuhan langsung.

Konsep dasar pengelolaan hutan mangrove pada hakikatnya merupakan suatu upaya integral antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan suatu kondisi lingkungan yang asri. Kondisi tersebut dapat tercipta jika konsep pelestarian hutan mangrove oleh petani tambak didasari oleh kesadaran bahwa hutan mangrove merupakan elemen yang tak terpisahkan dengan tambak. Tentu saja ini harus ditopang dengan kerjasama antara sesama petani tambak sehingga pelestarian hutan mangrove dapat maksimal.

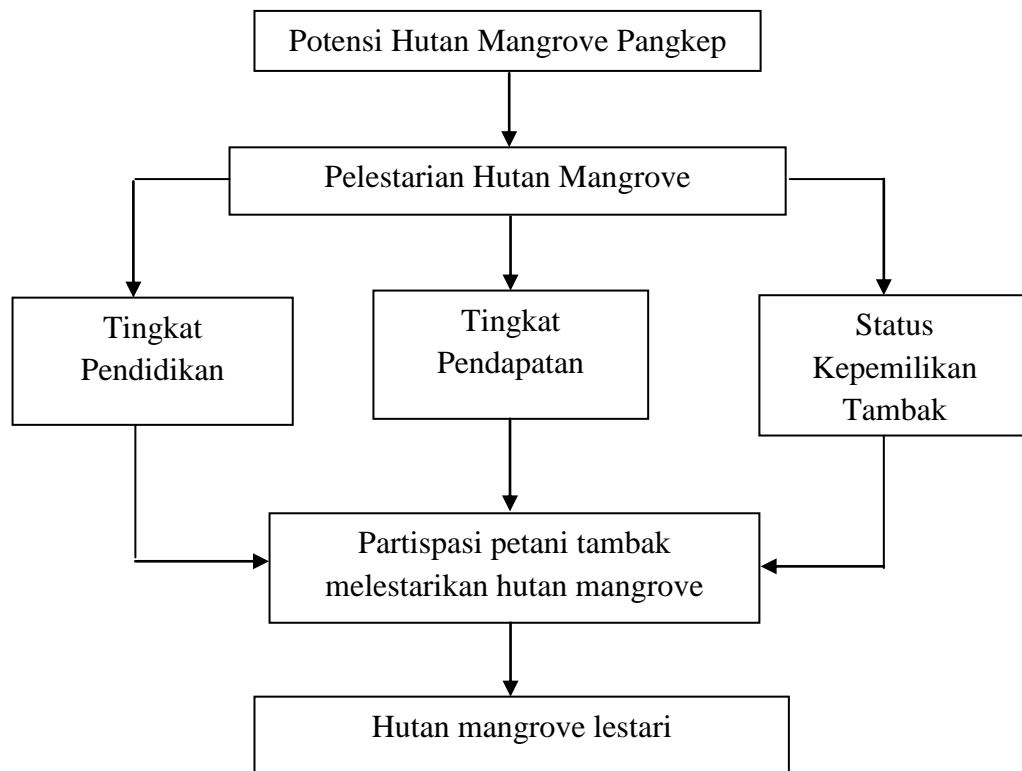
Akibat pertambahan penduduk yang cukup pesat dan pemenuhan kebutuhan manusia dalam menjalani hidup, termasuk perluasan lahan tambak oleh petani tambak, memaksa mereka mengalih fungsikan hutan mangrove sehingga jumlah luas hutan mangrove dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Penurunan luasan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep diperparah dengan buruknya kondisi hutan mangrove yang tersisa. Padahal, hutan mangrove sangat berperan terhadap peningkatan produksi tambak. Oleh karena itu, petani tambak harus menyadari betapa pentingnya mangrove sehingga partisipasi dan peran serta dalam melestarikan hutan mangrove perlu digiatkan. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh petani tambak adalah partisipasi dalam bentuk fisik, moral dan material. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan status kepemilikan lahan tambak.

Tingkat pendidikan berkaitan dengan pengetahuan, yang bisa memberikan informasi lebih banyak tentang hutan mangrove. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka partisipasi yang dia berikan akan semakin beragam. Sedangkan tingkat pendapatan berkaitan dengan seberapa besar partisipasi yang diberikan secara materi untuk pelestarian hutan mangrove.

Bentuk dan tingkat partisipasi yang dilakukan oleh petani tambak yang memiliki hak milik terhadap suatu tambak mungkin berbeda dengan petani tambak yang hanya berhak atas hak sewa suatu lahan tambak. Begitu juga dengan pekerja yang hanya dipekerjakan untuk mengelola suatu lahan tambak. Status kepemilikan

tambak diduga akan mempengaruhi tingkat partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, kajian pustaka, maupun kerangka pikir, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis, yaitu: terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan status kepemilikan tambak terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pangkep yang difokuskan di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labbakkang, dan Kecamatan Ma'rang. Untuk Kecamatan Bungoro dipilih Desa Boriappaka, Kecamatan Labbakkang dipilih Desa Pundatabaji dan untuk Kecamatan Ma'rang dipilih Desa Talaka.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani tambak di (Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labbakkang dan Kecamatan Ma'rang) Kabupaten Pangkep. Wilayah penelitian ini dipilih secara sengaja (*Purposive Sampling*). Untuk Kecamatan Bungoro dipilih Desa Boriappaka, Kecamatan Labbakkang dipilih Desa Pundatabaji dan untuk Kecamatan Ma'rang dipilih Desa Talaka.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *proporsional random sampling* dengan mengambil sampel sebesar 15% dari jumlah populasi (Arikunto, 2002), dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian adalah 117 Responden. Adapun distribusi *random sampling* seperti yang terlihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

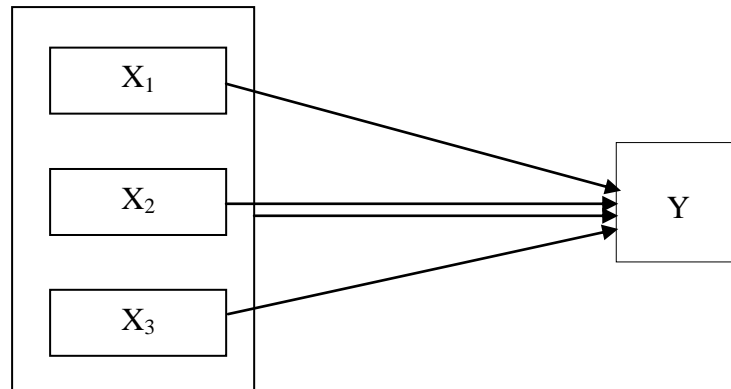
Nama Desa	Jumlah petani Tambak	Sampel penelitian (15% dari populasi target penelitian)
Boriappaka	274	41
Pundatabaji	268	40
Talaka	243	36
Jumlah	785	117

Sumber data: Kantor Kecamatan Bungoro, Labbakkang dan Ma'rang 2011

C. Variabel dan Desain Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan petani tambak, tingkat pendapatan petani tambak, status kepemilikan tambak dan partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

Dalam penelitian ini variable dibagi menjadi dua yaitu variabel bebas terdiri dari tingkat pendidikan petani tambak (X_1), tingkat pendapatan petani tambak (X_2), dan status kepemilikan tambak (X_3), sedangkan variabel terikatnya adalah partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove (Y). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Disain Penelitian

D. Defenisi Operasional Variabel

Untuk lebih memperjelas ruang lingkup penelitian ini maka dikemukakan definisi operasional variable dari beberapa konsep agar tidak terjadi kekeliruan.

1. Tingkat Pendidikan dimaksudkan adalah jenjang pendidikan formal yang diikuti oleh responden, diukur dari tingkat pendidikan yang telah dilaluinya yaitu: tamat/tidak tamat SD, SLTP/ sederajat, SMU/ sederajat, Akademi/PT. Menurut Undang-Undang no.2 tahun 1999, pengukuran tingkat pendidikan formal digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu: Tingkat pendidikan sangat tinggi, yaitu minimal pernah menempuh pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan tinggi, yaitu pendidikan SLTA/ sederajat. Tingkatan pendidikan sedang, yaitu pendidikan SMP/ sederajat. Tingkat pendidikan rendah, yaitu pendidikan SD/ sederajat.

2. Tingkat pendapatan petani tambak adalah jumlah penghasilan yang diperoleh oleh seorang petani tambak dalam bentuk uang atau benda baik yang bersumber atas modal sendiri maupun dari upah yang diperoleh dari pemilik tambak dalam kurung waktu tertentu. Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik (BPS, 2008) membedakan pendapatan menjadi 4 golongan adalah: Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara lebih dari Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata kurang dari 1.500.000,00 per bulan.
3. Status kepemilikan tambak adalah hak sah oleh hukum atas lahan berupa tambak pada suatu daerah tertentu untuk dikelola sesuai fungsinya demi tujuan tertentu yang digolongkan kedalam tiga bentuk yaitu hak milik, hak pakai dan hak sewa.
4. Partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove adalah sebagai keterlibatan dan keikutsertaan petani tambak secara sadar baik secara fisik dan moral dengan tujuan tertentu dalam pelestarian hutan mangrove yang mencakup:

- a) Partisipasi dalam bentuk fisik petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove adalah tingkat keterlibatan masyarakat secara fisik dalam pelestarian hutan mangrove. Indikator variabel ini adalah (1) keterlibatan petani tambak menanam mangrove, (2) keterlibatan petani tambak memelihara mangrove, (3) keterlibatan petani tambak memanfaatkan mangrove, (4) dan keterlibatan lainnya yang bersifat menunjang.
- b) Partisipasi moral petani tambak melestarikan hutan mangrove adalah tingkat keterlibatan secara moral/mental dalam melestarikan hutan mangrove berupa pemberian nasehat, saran kepada keluarga, masyarakat disekitarnya, sumbangan pikiran kepada pemerintah melalui rapat atau pertemuan.
- c) Partisipasi material petani tambak melestarikan hutan mangrove adalah keterlibatan dalam bentuk material berupa uang dan harta benda, pengadaan benih dan bibit.

E. Instrumen Penelitian

Instrument yang dipergunakan untuk memperoleh data tentang tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan status kepemilikan tambak adalah dengan pedoman wawancara. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove adalah pedoman wawancara dan pedoman angket.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi dilakukan untuk menjaring data sekunder.
2. Wawancara untuk mengetahui tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan status kepemilikan tambak petani tambak.
3. Wawancara dan angket untuk memperoleh data tentang partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

G. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, kedua, ketiga dan keempat dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik responden pada setiap variabel yang diukur. Untuk keperluan tersebut digunakan *mean*, *median*, *standar deviasi* dan distribusi frekwensi. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove maka pengkategorian dibagi dalam empat kategori sebagai berikut:

Mi + 1,5 SDi keatas Kategori Sangat Baik

Mi sampai dengan dibawah Mi + 1,5 SDi Kategori Baik

Mi – 1,5 SDi sampai dengan dibawah Mi Kategori Cukup

Dibawah Mi – 1,5 SDi Kategori Kurang

Dimana:

Mi = *Mean* atau rata-rata ideal

SDi = Standar deviasi ideal

Untuk menghitung besarnya *mean* ideal (Mi) digunakan rumus:

$$Mi = \frac{\text{Skor ideal tertinggi} + \text{Skor ideal terendah}}{2}$$

Untuk menghitung *standar deviasi* ideal (SDi) digunakan rumus:

$$SDi = \frac{\text{Skor ideal tertinggi} - \text{Skor ideal terendah}}{6}$$

(Arikunto dalam Fachruddin, 2011:27)

2. Untuk menjawab rumusan masalah kelima mempergunakan statistik inferensial yaitu teknik analisis regresi untuk menguji hipotesis. Sehubungan dengan penggunaan statistik inferensial tersebut, maka terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi yang diprasyaratkan bagi teknik analisis regresi ganda meliputi:

a. Uji Normalitas

Pada dasarnya penarikan sampel penelitian ini telah melalui prosedur sampling yang tepat, namun tidak tertutup kemungkinan adanya penyimpangan. Oleh karena itu, terhadap sampel yang diambil terlebih dahulu perlu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah cuplikan (sampel) yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. uji normalitas dengan *SPSS* dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan cara memperhatikan bilangan pada kolom signifikansi (Sig.) dan membandingkan dengan nilai α untuk menetapkan kenormalan. Kriteria pengujian apabila nilai Sig. $> \alpha$ maka dapat dinyatakan sampel berasal dari populasi normal (Fikri, 2012).

b. Uji Multikolinieritas.

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antar variabel bebas. Jika terdapat hubungan yang cukup tinggi (signifikan), berarti ada aspek yang sama diukur pada variabel bebas. Hal ini tidak layak digunakan untuk menentukan kontribusi secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji multikolinearitas dengan *SPSS* dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan nilai *VIF* (*variance inflation factor*) dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Kriteria yang digunakan adalah: jika nilai *VIF* di sekitar

angka 1 atau memiliki *tolerance* mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi. Semua perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SPSS* (Fikri, 2012).

c. Uji Hipotesis

Teknik analisis regresi ganda dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} , di mana kriteria pengujian jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Begitupula sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2010), Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak antara $110^0 - 113^0$ LS dan $4^0.40^0$ sampai dengan $8^0.00$ BT atau terletak di pantai barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
4. Sebelah barat berbatasan dengan pulau Kalimantan, Jawa, Madura, Nusa Tenggara dan Bali.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan yaitu 9 (sembilan) kecamatan yang terletak di wilayah daratan dan 3 (tiga) kecamatan yang terletak di wilayah kepulauan dengan luas wilayah $1.112,29 \text{ km}^2$ dan berjarak 51 km dari kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas kawasan hutan di Kabupaten Pangkep 1.764 ha.

Kualitas kawasan mangrove pada wilayah penelitian secara ekologi mengalami kerusakan. Adapun mangrove yang ada saat ini merupakan sisa tegakan mangrove dari beberapa jenis pohon penghuni habitat mangrove, seperti pohon bakau (*Rhizophora spp.*), api-api (*Avicennia spp.*), tancang (*Bruguiera spp.*), nipa

(*Nypapruticans*), dan prepat (*Sonneratia spp.*). Sebagian besar mangrove di Kabupaten Pangkep telah mengalami degradasi dan kompresi menjadi lahan tambak dan pemukiman dan untuk bahan bangunan dan kayu bakar. Jika hal ini tidak dilakukan penanganan yang serius dari pemerintah dan masyarakat maka kawasan mangrove di wilayah ini akan cepat musnah.

B. Penyajian Hasil Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

a. Tingkat Pendidikan Petani Tambak di Kabupaten Pangkep.

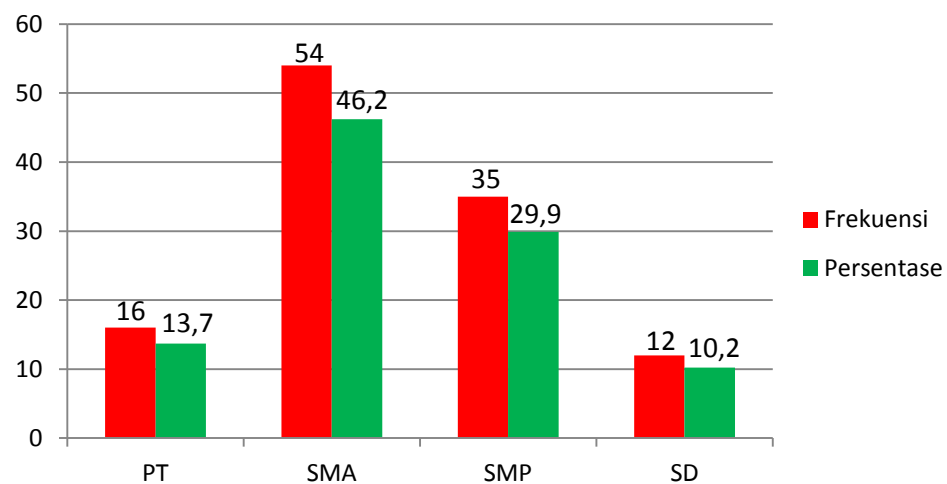
Tingkat pendidikan petani tambak di Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Distribusi frekuensi dan persentase tingkat pendidikan petani tambak di Kabupaten Pangkep.

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
PT	16	13,7
SMA	54	46,2
SMP	35	29,9
SD	12	10,2
Jumlah	117	100

Berdasarkan Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa dari 117 jumlah petani tambak yang menjadi sampel di Kabupaten Pangkep, tingkat pendidikan petani tambak yang paling tinggi frekuensinya adalah

tingkat pendidikan pada jenjang SMA, dengan kategori tinggi yakni sebanyak 54 orang (46,2%), sedangkan untuk tingkat pendidikan terendah frekuensinya yaitu kategori rendah atau SD yang hanya terdapat 12 orang petani tambak (10,2%). Hal ini berarti bahwa pada umumnya tingkat pendidikan petani tambak di Kabupaten Pangkep berada pada tingkat pendidikan SMA atau kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya, distribusi frekuensi tingkat pendidikan petani tambak di Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.1. Grafik tingkat pendidikan petani tambak di Kabupaten Pangkep.

b. Tingkat Pendapatan Petani Tambak di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap 117 orang petani tambak yang menjadi sampel dalam penelitian ini diperoleh gambaran tingkat

pendapatan petani tambak yang bervariasi mulai dari jumlah pendapatan paling rendah yaitu Rp. 1.500.000,- sampai dengan jumlah pendapatan paling tinggi yaitu Rp. 8.000.000,- perbulan yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi dan persentase tingkat pendapatan per bulan petani tambak di Kabupaten Pangkep.

No	Tingkat Pendapatan per bulan (Rp.)	Frekuensi	Persentase (%)
1	1.500.000	8	6,8
2	2.000.000	57	48,7
3	2.500.000	6	5,1
4	3.000.000	9	7,7
5	3.500.000	3	2,6
6	4.000.000	23	19,7
7	4.500.000	3	2,6
8	5.000.000	4	3,4
9	7.000.000	1	0,9
10	7.500.000	1	0,9
11	8.000.000	2	1,7
Jumlah		117	100

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan terbanyak petani tambak di Kabupaten Pangkep adalah Rp. 2.000.000,- perbulan yaitu sebanyak 57 petani tambak atau 48,7 %. Untuk frekuensi tingkat pendapatan tertinggi kedua petani tambak di Kabupaten Pangkep yaitu Rp. 4.000.000,- yakni terdapat 23 petani tambak atau 19,7

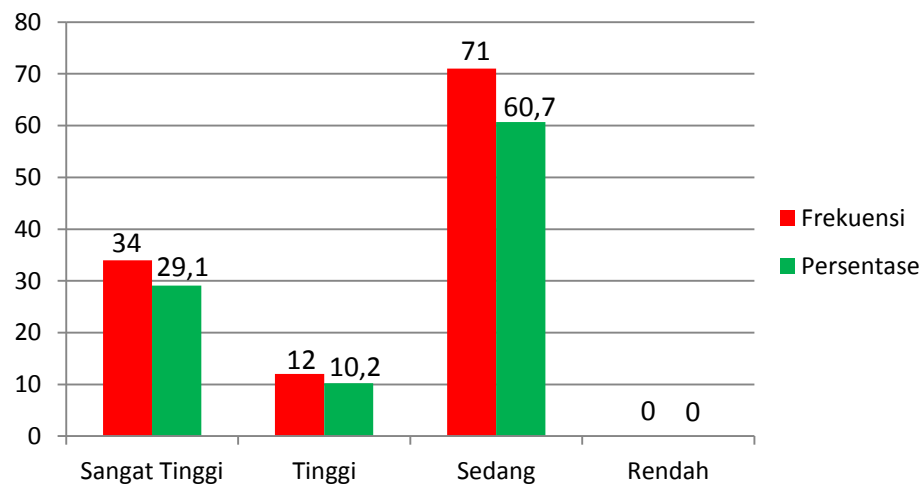
%. Sedangkan tingkat pendapatan yang paling rendah persentasenya yaitu Rp. 7.000.000,- dan 7.500.000,- masing-masing terdapat 1 (satu) petani tambak atau 0,9 %. Selanjutnya, data di atas dikonversikan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2008) yang membedakan pendapatan menjadi 4 kategori yakni kategori sangat tinggi yaitu interval kelas di atas Rp. 3.500.000,-, kategori tinggi yaitu interval kelas lebih dari Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.500.000,-, kategori sedang yaitu antara Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.500.000,-, dan kategori rendah yaitu pendapatan di bawah Rp.1.500.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Distribusi frekuensi dan persentase tingkat pendapatan petani tambak di Kabupaten Pangkep.

Kategori	Interval Pendapatan Per bulan	Frekuensi	Persentase (%)
Tinggi Sekali	> 3,5 juta	34	29,1
Tinggi	>2,5 juta – 3,5 juta	12	10,2
Sedang	1,5 juta – 2,5 juta	71	60,7
Rendah	< 1,5 juta	0	0
Jumlah		117	100

Berdasarkan Tabel 4.3. di atas dapat diketahui bahwa dari 117 jumlah petani tambak di Kabupaten Pangkep yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan tingkat pendapatan yang dominan berada pada kategori sedang yakni interval Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.500.000,- yaitu

sebanyak 71 petani tambak atau 60,7 %. Sedangkan untuk kategori rendah yakni tingkat pendapatan petani tambak di interval kurang dari Rp. 1.500.000,- tidak terdapat petani tambak, atau dengan kata lain frekuensi dan persentasenya 0. Hal ini berarti bahwa pada umumnya tingkat pendapatan petani tambak di Kabupaten Pangkep per bulannya tergolong sedang. Untuk lebih jelasnya, distribusi frekuensi pendapatan per bulan petani tambak di Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.2. Grafik pendapatan per bulan petani tambak di Kabupaten Pangkep.

c. Status Kepemilikan Tambak Petani Tambak di Kabupaten Pangkep.

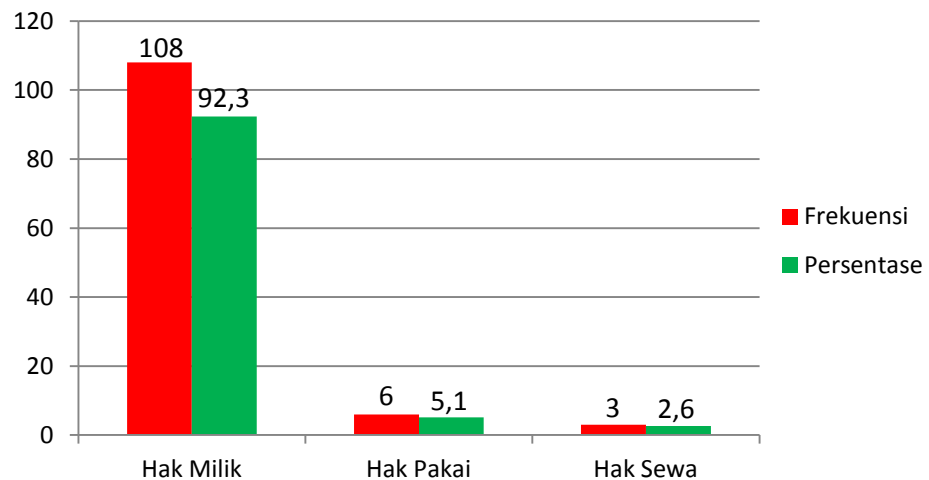
Berdasarkan hasil analisis data terhadap 117 orang petani tambak di Kabupaten Pangkep yang menjadi sampel dalam penelitian ini, diperoleh gambaran bahwa status kepemilikan tambak oleh petani tambak

di Kabupaten Pangkep berada pada kategori hak milik yakni sebanyak 108 frekuensi atau 92,3 % dari jumlah total. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 4.4. berikut ini.

Tabel 4.4. Status kepemilikan tambak petani tambak di Kabupaten Pangkep.

Interval Status Kepemilikan Tambak	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Hak Milik	108	92,3
2	Hak Pakai	6	5,1
3	Hak Sewa	3	2,6
Jumlah		117	100

Berdasarkan Tabel 4.4. di atas dapat diketahui bahwa dari 117 jumlah petani tambak di Kabupaten Pangkep yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat 108 orang (92,3%) yang status kepemilikan tambaknya merupakan hak milik, terdapat 6 orang (5,1%) yang status kepemilikan tambaknya merupakan hak pakai, terdapat 3 orang (2,6%) yang status kepemilikan tambaknya merupakan hak sewa. Hal ini berarti bahwa pada umumnya status kepemilikan tambak petani tambak di Kabupaten Pangkep merupakan hak milik. Untuk lebih jelasnya, distribusi frekuensi status kepemilikan tambak petani tambak di Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Gambar 4.3. Grafik status kepemilikan tambak petani tambak di Kabupaten Pangkep.

d. Partisipasi Petani Tambak dalam Melestarikan Hutan Mangrove di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap 117 orang petani tambak yang menjadi sampel dalam penelitian ini diperoleh gambaran, yaitu skor partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep sangat variatif. Skor tertinggi partisipasi petani tambak adalah 108 sedangkan skor terendah adalah 90. Gambaran yang lebih terperinci dan tersusun rapi tentang partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep beserta frekuesinya dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Distribusi frekuensi dan persentase skor partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

No	Skor Partisipasi Petani Tambak	Frekuensi	Persentase (%)
1	90	5	4,3
2	92	5	4,3
3	93	2	1,7
4	94	12	10,3
5	95	14	12,0
6	96	19	16,2
7	97	5	4,3
8	98	9	7,7
9	99	1	0,9
10	100	5	4,3
11	102	5	4,3
12	103	10	8,5
13	104	13	11,1
14	106	8	6,8
15	107	2	1,7
16	108	2	1,7
Jumlah		117	100

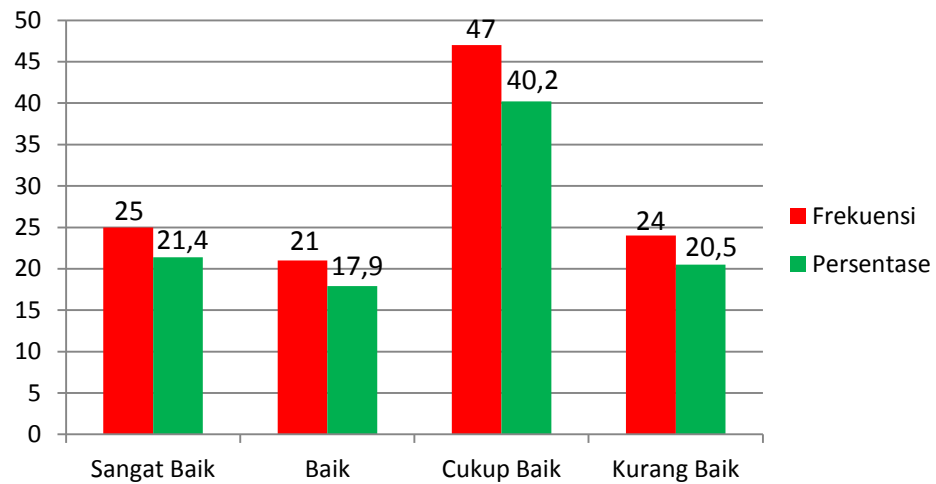
Berdasarkan Tabel 4.5. di atas, dapat diketahui bahwa frekuensi paling tinggi tentang partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep adalah skor 96 yaitu sebanyak 19 frekuensi atau 16,2 %. Sedangkan untuk skor terendah adalah 99 yaitu

terdapat 1 (satu) petani tambak atau 0,9 %. Selanjutnya, skor partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep tersebut dikonversi pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Interval skor partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

Kategori	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Baik	104- 108	25	21,4
Baik	99 – 103	21	17,9
Cukup Baik	95- 98	47	40,2
Kurang Baik	90 – 94	24	20,5
Jumlah		117	100

Berdasarkan Tabel 4.6. di atas diketahui bahwa dari 117 orang petani tambak yang menjadi sampel dalam penelitian, interval skor partisipasi yang paling dominan adalah kategori cukup baik yaitu sebanyak 47 frekuensi atau 40,2 %. Sedangkan skor terendah partisipasi petani tambak adalah interval skor baik, yakni terdapat 21 frekuensi atau 17,9 %. Hal ini berarti bahwa pada umumnya partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep berada pada kategori cukup baik. Untuk lebih jelasnya, distribusi frekuensi status kepemilikan tambak petani tambak di Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.4. Grafik partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

2. Analisis Inferensial

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan kriteria pengujian, jika nilai Sig. > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal, namun sebaliknya jika nilai Sig. < 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.7. Berdasarkan uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai Sig. > α atau $0,124 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data berdistribusi normal.

Tabel 4.7. Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*

Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		117
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.55099742
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		1.180
Asymp. Sig. (2-tailed)		.124

a. Test distribution is Normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.8. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	TingkatPendidikanX1	.964	1.037
	TingkatPendapatanX2	.962	1.040
	StatusKepemilikanTambakX3	.986	1.015

a. Dependent Variable: Partisipasi Petani Tambak Y

Uji multikolinearitas yang diperlihatkan pada Tabel 4.8. dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan nilai *VIF* (*variance inflation factor*) dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Kriteria yang digunakan adalah: jika nilai *VIF* di sekitar angka 1 atau memiliki *tolerance* mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Berdasarkan tabel *coefficients* di atas diketahui bahwa nilai *VIF* untuk ketiga variabel independen berkisar angka 1 dan memiliki nilai *tolerance* mendekati angka 1 yang berarti bahwa keseluruhan variabel independen tidak mengalami gangguan multikolinieritas.

c. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara tingkat pendidikan petani tambak (X_1), tingkat pendapatan petani tambak (X_2), dan status kepemilikan tambak petani tambak (X_3) secara sendiri-sendiri terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di kabupaten Pangkep (Y). Sedangkan, analisis regresi ganda digunakan untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama variabel X_1 , X_2 , X_3 terhadap variabel Y .

1) Pengujian Hipotesis Pertama

Tabel 4.9. Rangkuman hasil pengujian regresi linier sederhana pengaruh variabel X_1 terhadap variabel Y

Variabel	Harga R dan R^2			Harga T		Koefisien	Konstant
	R_{hitung}	R_{square}	R_{tabel}	T_{hitung}	T_{tabel}		
X_1 - Y	0,883	0,781	0,176	20,226	1,980	1,446	82,492

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 4.9. dengan taraf signifikansi 5 % maka didapatkan nilai r_{hitung} sebesar 0,883 lebih besar

dari r_{tabel} (0,176) dan koefisien determinasi r_{square} sebesar 0,781 yang berarti 78,1% pengaruh tingkat pendidikan petani tambak (X_1) terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep (Y) dan dengan $db = N-1 = 117-1 = 116$ sebesar 1,980 pada taraf signifikansi 5% maka $t_{\text{hitung}} (20,226) > t_{\text{tabel}} (1,980)$. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa tingkat pendidikan petani tambak berpengaruh dan memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

Persamaan garis regresi pengaruh tingkat pendidikan petani tambak (X_1) terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove (Y) dapat dinyatakan dengan $Y = 1,446.X_1 + 82,492$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_1 sebesar 1,446 yang berarti apabila tingkat pendidikan petani tambak (X_1) meningkat 1 poin maka partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove (Y) akan meningkat 1,446 poin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran uji hipotesis.

2) Pengujian Hipotesis Kedua

Tabel 4.10. Rangkuman hasil pengujian regresi linier sederhana antara variabel X_2 terhadap variabel Y

Variabel	Harga R dan R^2			Harga T		Koefisien	Konstant
	R_{hitung}	R_{square}	R_{tabel}	T_{hitung}	T_{tabel}		
X_2 -Y	0,900	0,810	0,176	22,108	1,980	3.203	89.253

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 4.10. dengan taraf signifikansi 5 % maka didapatkan nilai r_{hitung} sebesar 0,900 lebih besar dari r_{tabel} (0,176) dan koefisien determinasi r_{square} sebesar 0,810 yang berarti 81% pengaruh tingkat pendapatan petani tambak (X_2) terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep (Y) dan dengan $db = N-1 = 117-1 = 116$ sebesar 1,980 pada taraf signifikansi 5% maka $t_{hitung} (22,108) > t_{tabel} (1,980)$. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa tingkat pendapatan petani tambak berpengaruh dan memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

Persamaan garis regresi pengaruh tingkat pendapatan petani tambak (X_2) terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove (Y) dapat dinyatakan dengan $Y = 3.203.X_2 + 89.253$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_2 sebesar 3.203

yang berarti apabila tingkat pendapatan petani tambak (X_2) meningkat 1 poin maka partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove (Y) akan meningkat 3.203 poin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran analisis data.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga

Tabel 4.11. Rangkuman hasil pengujian regresi linier sederhana antara variabel X_3 terhadap variabel Y

Variabel	Harga R dan R^2			Harga T		Koefisien	Konstant
	R_{hitung}	R_{square}	R_{tabel}	T_{hitung}	T_{tabel}		
X_3 -Y	0,487	0,237	0,176	5,976	1,980	6.087	91.699

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 4.11. dengan taraf signifikansi 5 % maka didapatkan nilai r_{hitung} sebesar 0,487 lebih besar dari r_{tabel} (0,176) dan koefisien determinasi r_{square} sebesar 0,237 yang berarti 23,7% pengaruh status kepemilikan tambak petani tambak (X_3) terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep (Y) dan dengan $db = N-1 = 117-1 = 116$ sebesar 1,980 pada taraf signifikansi 5% maka t_{hitung} (5,976) > t_{tabel} (1,980). Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yaitu status kepemilikan tambak petani tambak berpengaruh dan memiliki hubungan positif terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

Persamaan garis regresi pengaruh status kepemilikan tambak petani tambak (X_3) terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove (Y) dapat dinyatakan dengan $Y = 6.087.X_3 + 91.699$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_3 sebesar 6.087 yang berarti apabila status kepemilikan tambak petani tambak (X_3) meningkat 1 poin maka partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove (Y) akan meningkat 6.087 poin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran uji hipotesis.

4) Pengujian Hipotesis Keempat

Tabel 4.12. Hasil pengujian regresi linier ganda antara variabel X_1 , X_2 , dan X_3 secara bersama-sama terhadap variabel Y

Variabel	Harga R dan R^2			Harga F		Koefisien			Konst.
	R _{hitung}	Adjusted R _{square}	R _{tabel}	F _{hitung}	F _{tabel}	X_1	X_2	X_3	
$X_1, X_2, X_3 - Y$	0,977	0,952	0,176	776,241	2,68	0.655	3.066	4.488	87.384

Berdasarkan perhitungan seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.12. didapatkan nilai r_{hitung} sebesar 0,997, artinya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan status kepemilikan tambak petani tambak secara bersama-sama memiliki hubungan positif terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep di mana harga r_{hitung} (0,977) lebih besar dari r_{tabel} (0,176) dan

koefisien determinasi yang digunakan pada regresi ganda adalah *adjusted r_{square}* sebesar 0,952, yang berarti 95,2% pengaruh variabel tingkat pendidikan (X_1), tingkat pendapatan petani tambak (X_2), dan status kepemilikan tambak (X_3) secara bersama-sama terhadap variable bebas partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep (Y). Selanjutnya, dengan $dk = N-3 = 117-3 = 114$ sebesar 2,68 pada taraf signifikansi 5% maka F_{hitung} lebih (776,241) > F_{tabel} (2,68). Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan status kepemilikan tambak petani tambak secara bersama-sama berpengaruh dan memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

Persamaan garis regresi pengaruh tingkat pendidikan (X_1), tingkat pendapatan (X_2), dan status kepemilikan tambak petani tambak (X_3) secara bersama-sama terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove (Y) dapat dinyatakan dengan $Y = 0.655.X_1 + 3.066.X_2 + 4.488.X_3 + 87.384$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila tingkat pendidikan (X_1) meningkat 1 poin maka partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove (Y) akan meningkat 0.655 poin dengan asumsi X_2 dan X_3 tetap, apabila tingkat pendapatan (X_2) meningkat 1 poin maka partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove (Y) akan meningkat 3.066 poin

dengan asumsi X_1 dan X_3 tetap, dan apabila status kepemilikan tambak petani tambak (X_3) meningkat 1 poin maka partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove (Y) akan meningkat 4.488 poin dengan asumsi X_1 dan X_2 tetap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran uji hipotesis.

Berbagai hasil uji statistik deskriptif dan inferensial di atas mengarah pada suatu kesimpulan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan status kepemilikan tambak petani tambak berpengaruh terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

C. Pembahasan

Hasil analisis deskriptif tentang tingkat pendidikan petani tambak di Kabupaten Pangkep diketahui bahwa tingkat pendidikan petani tambak tergolong tinggi atau berada pada tingkat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa, ada relevansi antara tingkat pendidikan petani tambak dengan partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove.

Tingkat pendidikan tinggi (SMA) secara signifikan berpengaruh terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa besarnya partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di sebabkan karena adanya pemahaman petani tambak akan

pentingnya hutan mangrove bagi peningkatan produktifitas tambak mereka. Bentuk pemahaman atau pengetahuan tentang hutan mangrove berdasarkan pengamatan di lokasi, sebagian besar petani tambak menanam tumbuhan mangrove di pinggiran tambak sebagai penangkal gempuran ombak laut.

Pemahaman akan fungsi dan manfaat hutan mangrove bagi petani tambak tentu saja sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petani tambak. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan petani tambak maka semakin besar pula pemahamannya akan fungsi dan manfaat hutan mangrove yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove.

Selanjutnya, penelitian ini membahas tentang tingkat pendapatan petani tambak di Kabupaten Pangkep yang dikaitkan dengan seberapa besar tingkat partisipasi yang diberikan dalam pelestarian hutan mangrove. Idealnya, tingkat pendapatan yang tinggi maka akan partisipasi dalam melestarikan hutan mangrove juga akan tinggi. Dalam penelitian ini, berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan tingkat pendapatan petani tambak di Kabupaten Pangkep masih tergolong sedang. Hal ini membenarkan gambaran hasil pengamatan peneliti bahwa di sekitar lokasi penelitian masih ada petani tambak yang menebang hutan mangrove untuk keperluan kayu bakar.

Hasil pengamatan lebih lanjut, peneliti juga mendapati hasil olahan kayu dari hutan mangrove dikeringkan untuk dijual. Ini menunjukkan bahwa sebagian petani tambak dari segi pendapatan belum berada pada kategori tinggi. Namun demikian,

besarnya partisipasi petani tambak dapat dilihat dari besarnya minat petani tambak dalam mengikuti penanamn pohon mangrove yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan terkhusus organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup dengan ikut memberikan sumbangan baik secara materi, tenaga maupun moral.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kordi (2012), yang mengatakan bahwa jika taraf hidup masyarakat pesisir lebih baik, maka aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara deskruktif dapat ditekan. Itupun harus dibarengi dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pesisir mengenai pentingnya kelestarian ekosistem pesisir, serta kesadaran masyarakat pesisir untuk melestarikannya.

Aktivitas petani tambak di kawasan hutan mangrove sedikit banyak mempengaruhi kelestarian mangrove. Kordi (2012) merinci penyebab kerusakan mangrove antara lain (1) kemiskinan masyarakat pesisir; (2) kepadatan masyarakat pesisir; (3) ekspansi modal; (4) konsumsi berlebihan; (5) Rendahnya pengetahuan dan pemahaman Masyarakat; dan (6) lemahnya penegakan hukum.

Kemiskinan yang menjadi perwujudan tingkat pendapatan masyarakat dan rendahnya pengetahuan dan pemahaman yang berkenaan dengan tingkat pendidikan yang menjadi faktor kajian dalam penelitian ini, memberikan pengaruh yang beragam terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove. Peningkatan pengetahuan dan penyadaran masyarakat mengenai ekosistem pesisir

(mangrove, padang lamun, dan terumbu karang) harus menjangkau berbagai elemen masyarakat dan harus sejak dini mungkin (Indriyanto, 2010).

Status kepemilikan tambak di Kabupaten Pangkep juga sangat berperan besar terhadap keikutsertaan petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove. Analisis data menunjukkan bahwa sebagai besar lahan tambak yang menjadi sampel penelitian merupakan hak milik yang digarap sendiri oleh petani tambak dan berpengaruh positif terhadap pelestarian hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

Pengklasifikasian fungsi kawasan pantai dan hutan mangrove di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti peraturan perundangan yang ada. Hal ini berakibat kepada timbulnya berbagai pelanggaran-pelanggaran pengelolaan lahan dan kerusakan kawasan pantai. Pengelolaan kawasan lindung pantai seharusnya lebih menitikberatkan kepada pertimbangan ekologisnya daripada kajian sosial ekonomisnya.

Pengelolaan kawasan budidaya pantai tidak dapat dipisahkan dari status fungsi dan kepemilikan lahan pada kawasan tersebut. Pemberian hak atas tanah, baik yang dikuasai secara perorangan maupun yang dikuasai secara adat untuk lahan-lahan daratan yang tidak dipengaruhi pasang surut air laut lebih mudah diselesaikan, karena sudah diatur oleh Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan perundangan.

Status kepemilikan petani tambak akan lahan tambaknya sangat menentukan tingkat partisipasi petani tambak dalam pelestarian hutan mangrove. Hal ini diperlihatkan dengan adanya tingkat kepedulian yang lebih dan rasa kepemilikan sehingga petani tambak juga berusaha melestarikan hutan mangrove. Dengan status

kepemilikan, petani tambak selalu merapikan dan membersihkan pinggiran hutan mangrove yang bersentuhan langsung dengan lokasi tambak mereka.

Berdasarkan pengamatan peneliti, petani tambak yang mengelola sebidang lahan tambak dengan status hanya hak pakai atau hak sewa, acuh ak acuh membuang sampah dipinggiran hutan mangrove yang berbatasan langsung dengan lahan tambaknya. Ini menandakan bahwa status kepemilikan tambak juga sangat berpengaruh terhadap pelestarian hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

Partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove jika dijabarkan secara gamblang berdasarkan faktor-faktor yang merusak ekosistem mangrove oleh Kordi, dapat disimpulkan bahwa sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan seseorang. Sedangkan status kepemilikan tambak merupakan faktor pendukung yang juga sangat berperan dalam proses partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah segala bentuk perlakuan petani tambak sebagai masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan mangrove untuk mencapai tujuan tertentu. Azis (2006) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat baik secara individu atau perorangan maupun kelompok secara aktif serta penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Hal-hal yang dilakukan petani tambak berdasarkan pengamatan peneliti adalah (1) menegur jika ada pemburu yang hendak berburu disekitar wilayah tambak mereka; (2) berusaha merapikan pinggiran mangrove yang bersentuhan langsung dengan tambak mereka; (3) mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan oleh

pemerintah tentang hutan mangrove dan dampaknya; dan (4) sebagian petani tambak ikut berperan dalam penanaman pohon dikawasan hutan mangrove.

Berdasarkan hal tersebut, partisipasi petani tambak dapat dikategorikan sebagai partisipasi aktif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pretty & Hart (dalam Sondita, 2005) yang mengatakan tingkat partisipasi sebagai berikut: (1) partisipasi pasif bilamana masyarakat hanya datang mendengarkan penjelasan, (2) partisipasi aktif jika masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi.

Besarnya tingkat partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove dari penelitian ini sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan status kepemilikan tambak. Hal ini berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi ganda sehingga diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (X_1), tingkat pendapatan (X_2), dan status kepemilikan tambak (X_3) secara bersama-sama berpengaruh dan memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis inferensial dapat diketahui bahwa:

1. Tingkat pendidikan petani tambak di Kabupaten Pangkep tergolong tinggi yaitu Sekolah Menengah Atas.
2. Tingkat pendapatan per bulan petani tambak di Kabupaten Pangkep masih tergolong sedang.
3. Status kepemilikan lahan tambak petani tambak di Kabupaten Pangkep merupakan hak milik.
4. Partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep berada pada kategori cukup baik.
5. Tingkat pendidikan petani tambak (X_1), tingkat pendapatan petani tambak (X_2), status kepemilikan tambak (X_3) secara bersama-sama berpengaruh dan memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi petani tambak dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Pangkep.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran sebagai berikut.

1. Pelestarian hutan mangrove di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat pesisir, pemerhati lingkungan, LSM, petani tambak, dan lain-lain guna keberlanjutan kelestarian hutan mangrove di wilayah tersebut.
2. Pelestarian hutan mangrove harus diawali dengan peningkatan pemahaman petani tambak sebagai subjek yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan mangrove tentang tata cara yang tepat dalam melestarikan hutan mangrove dengan penyuluhan yang rutin dari instansi terkait.
3. Dampak negatif dari kerusakan hutan mangrove harus disosialisasikan pada petani tambak sehingga pelestarian hutan mangrove hendaknya berbasis masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam melestarikan hutan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ishak. 2001. *Filsafat Ilmu Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Anonim, 2010. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkep.
- Anonim. 2011. *Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan*. Harian Fajar Makassar
- Anwar, J. 1984. *Ekologi Ekosistem Sumatra*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Arief, Arifin. 2003. *Hutan Mangrove (Fungsi dan Manfaatnya)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta
- Azis, Aisyah. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan di Kecamatan Tanente Riantang Kota Watampone. *Tesis* tidak dipublikasikan. Makassar: PPs UNM
- Bahar. 2009. Pengelolaan Derah Pesisir. *Makassar: Jurnal Kajian Lingkungan*, 2 (2), 1-18.
- Bimo & Peter Hagul. 1985. *Penanggulangan Kesehatan di Pedesaan dalam Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Badan Pusat Statistik, 2008. *Klasifikasi Tingkat Pendapatan Masyarakat*. (Online), (<http://belalangtue.wordpress.com/>), Diakses tanggal 21 Desember 2009).

- Dahuri, Dkk. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta :Pradnya Paramita.
- Daniel, Moehar, dkk. 2005. *Participatory Rural Appraisal, Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Kehutanan. 2001. Eksekutif. *Data Strategis Kehutanan*. Badan Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Fajar. 2011. *Pelestarian Lingkungan, Studi dan Kajian*. Surabaya: Balai Cipta
- Fachruddin. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Gambar Teknik pada Jurusan Teknik Perbaikan Bodi Otomotif SMK Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep*. Makassar: Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar.
- Ihlas. 2012. *Kajian Hukum Pendirian Bangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Indriyanto. 2010. *Ekologi Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadarya. 1991. *Dasar-dasar Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- Kordi, K.M.G.H.. 2012. *Ekosistem Mangrove (Potensi, Fungsi, dan Pengelolaan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukhtasor. 2007. *Pencemaran Pesisir dan Laut*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Muryono, Koesman, at ad. 2000. *Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan (Kumpulan Informasi Kehutanan)* edisi kedua. Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- Nuraini, Fatta., 2002. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Patang. 2004. *Ilmu Ekonomi suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Purnobasuki, Hery. 2005. *Tinjauan Perspektif Hutan Mangrove*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardja, Pratama. 2006. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Sastropoetra. 1997. *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Salam, Sofyan & Bangkona, Deri. 2010. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Seniwati. 2009. Partisipasi Masyarakat Pesisir Melestarikan Hutan Mangrove di Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasungu Kabupaten Takalar. *Tesis* tidak dipublikasikan. Makassar. PPs UNM.
- Slamet, 1989. *Pembangunan masyarakat berbasis partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sondita, 2005. *Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berpihak Kepada Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecil, Pembealajaran dari Program MFCDP Tahun 2004-2005*. Sekretarian MFCDP, BAPPENAS.
- Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyatno. 2001. Perbedaan Tingkat Kecemasan Menghadapi Kecenderungan Impotensi Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan. *Skripsi* (Tidak Diterbitkan), Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Waji, MA. 2002. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan (Survei di Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Makassar). *Tesis* tidak dipublikasikan. Makassar: PPs UNM.
- Yafet, Nikodemus Tutuop. 2004. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Fakfak. *Tesis* tidak dipublikasikan. Makassar: PPs UNM.
- Yunus, Muh. 2005. Pengelolaan Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Pinrang. *Tesis* tidak dipublikasikan. Makassar. PPs UNM.

RIWAYAT HIDUP



M. Jasmin. Lahir di Kampung Baru Kelurahan Boriappaka Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep pada tanggal 18 Juli 1986, anak pertama dari empat bersaudara buah cinta dari H. Musa S.Pd. dan Hj. Haniang, S.Pd.

Penulis mengawali pendidikan formal di jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pembina pada tahun 1991-1992. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar negeri (SDN) No. 8 Talappasa Kabupaten Pangkep pada tahun 1992- 1998. Selanjutnya tahun 1998 penulis melanjutkan ke SLTP Negeri 2 Pangkejene hingga tahun 2001. Tahun 2001-2004 penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pangkajene Kabupaten Pangkep. Penulis kemudian melanjutkan studi di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2004-2010 sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar jurusan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Tanggal 9 Juli 2011, penulis mengakhiri masa lajang dengan mempersunting Gadis bugis Bone bernama Hikmawati, SS. dan telah dikarunia seorang anak perempuan pada tahun 2012 bernama Azizah Naurah Nadhifa Jasmin.

Kegiatan organisasi yang diikuti oleh penulis antara lain, organisasi pecinta Alam Gubas Pala tahun 2004, Pengurus Hmpunan Mahasiswa Otomotif tahun 2005-2006, Sekretaris Umum IPPM Pangkep Koordinator UNM tahun 2007, IKRAR, dan sekarang aktif di NGO Gemma 9.